

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

(Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)



OLEH

AZHARUL NUGRAHA PUTRA PATURUSI

B11113069

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN OLEH KARYAWAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**
(Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)

Oleh :

AZHARUL NUGRAHA PUTRA PATURUSI

B111 13 069

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Departemen Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

(Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)

Disusun dan Diajukan oleh:

AZHARUL NUGRAHA PUTRA PATURUSI

B111 13 069

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 15 Februari 2017
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris,



Dr. H. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Azharul Nugraha Putra Paturusi

No. Pokok : B 111 13 069

Departemen : Hukum Pidana

Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara**
(Studi Kasus Putusan: Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

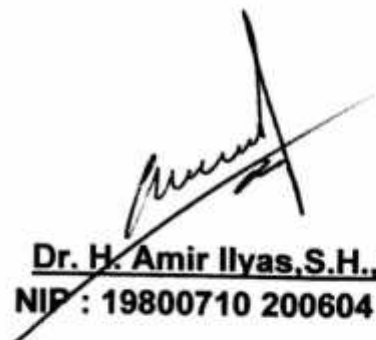
Makassar, Januari 2017

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si
NIP : 19620711 198703 1 001

PEMBIMBING II



Dr. H. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP : 19800710 200604 1 001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUPH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: AZHARUL NUGRAHA PUTRA PATURUSI
Nomor Pokok	: B11113069
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2017

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,



Prof. Dr. Anwaradi Miru, SH., MH

NIP. 19670607 198601 1 003

ABSTRAK

**AZHARUL NUGRAHA PUTRA PATURUSI (B11113069),
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan
oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan
Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks), di bawah bimbingan M. Said
Karim selaku pembimbing I dan Amir Ilyas selaku pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil serta untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dalam Putusan Nomor: 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, khususnya pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara hakim serta memperoleh data putusan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menguraikan sesuai dengan permasalahan kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks menggunakan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut. Begitupula Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tepat diterapkan pada perkara ini karena perbuatan dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tidak terpenuhi karena terdakwa tidak terbukti memperoleh bagian. (2) Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pada perkara nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks didasarkan fakta-fakta persidangan, alat bukti dan peraturan perundang-undangan maka hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang berakibat merugikan keuangan negara dan tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf. Maka terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Sehingga putusan majelis hakim berupa pembedaan sudah tepat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahir rahmaanir rahiim.

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan karunia dan berkahnya yang telah diberikan kepada penulis, serta shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)** Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis. Pertama-tama kepada sosok perempuan yang melahirkan dan membesarkan penulis yaitu Ibunda tercinta Nurmila, SH. Kemudian kepada ayahanda penulis Basuki, SH. Kepada saudara penulis kakanda Anugrah Novian Utami P, S.AP dan adinda Achmad Yusril Ihzamahendra. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga besar penulis, Puang Hj. Bungati A. Paturusi, A.Ma dan Puang Nurlimsih A. Paturusi. Kakanda Ahmad Tawakkal P, SH.MH. kakanda Dwie Hikmawati P, S.Pt kakanda Try Fitry Widyawati P, S.IP dan kakanda Ratih Kumala Wahyu P, S.Pi, yang telah membantu moril

maupun materil kepada penulis serta keponakan penulis yang tercinta, Azalea Dinillah dan St. Nawrah Tenriola.

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Ariestina Pulubuhu MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Wakil Rektor lainnya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum**, Bapak **Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan I, **Dr. Syamsuddin Mukhtar, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan II, dan **Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan III;
3. Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.H.** selaku ketua bagian Hukum Pidana;
4. Bapak **Prof. Dr. H.M. Said Karim S.H.,M.H.,M.Si** dan **Dr. H. Amir Ilyas S.H.,M.H.** selaku pembimbing, terima kasih atas segala bimbingannya selama ini memberikan saran dan kritikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi;
5. Bapak **Prof. Dr. Andi Sofyan, SH.MH., Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH.MH.DFM.,** dan Ibu **Dr. Hj. Haeranah, SH.MH.** selaku dosen penguji penulis.
6. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, seluruh staf pengajar (Dosen), dan Staf akademik yang telah banyak membantu;

7. Bapak **Dr. Abdul Razak, SH. MH.** Selaku Hakim Pengadilan Tipikor atas bimbingan dan kesediaannya melakukan wawancara;
8. Pegawai Pengadilan Negeri Makassar yang membantu penulis selama masa penelitian;
9. Saudaraku Muhammad Mubarak Chadyka Putra,c.S.H. alias Cikal sahabat seperjuangan yang senantiasa membantu kekurangan penulis sejak berada di Kota Parepare hingga beranjak Kuliah bersama-sama di FH-UH Makassar. Saudaraku Bayu Ramadhana Putra alias Kak Bayy, Muhammad Iqbal Muhlis alias Iqbal, Kaharuddin Syam alias Kahareddeng, Riko Wikarno A.Md.Kom alias Rico, dan Miftahul Reski Ihsan A.Md.Kom alias Rahul seperjuangan dari Parepare hingga kini, walau berpisah perguruan tinggi tapi semoga kita sukses bersama;
- 10.Yayasan Karya Salemba Empat yang rutin memberikan bantuan beasiswa kepada penulis dalam menjalani satu tahun terakhir masa kuliah. Juga keluarga besar Paguyuban KSE Unhas yang telah mempercayai penulis mengemban amanah dalam paguyuban;
- 11.Keluarga di UKM LD Asy-Syariah MPM, LEDHAK, AMPUH tanpa terkecuali;
- 12.Keluarga besar *The Recht Marginal* FH-UH keseluruhan tanpa terkecuali, terima kasih atas rasa persaudaraan dan kekeluargaannya selama masa perkuliahan;

13. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis menjalani perkuliahan di FH-UH hingga kini, keluarga besar “TAMPAN?”, Akbar dan Alif (sikembar), Ansyar dan Dirwan (soulmate), Adi (Pak Menteri), Taufiq (profesor), Fadel (Polem), Dinul dan Adit (Soulmate²) dan semuanya tanpa terkecuali;
14. Sahabat-sahabatku, Asfian Praditya Djafar dan Muhammad Agung yang selalu bersama dari maba hingga kini. Fazlurrahman sobatku saat maba. Firman Zulkifli dan Fikri Amin yang telah memberi penulis tempat berteduh selama menyusun dan mempersiapkan ujian skripsi ini. Para rekan seperjuangan mengejar SH, Muhammad Guntur, Widya Islamiyah (teman ujian proposal), Firda Savaros, Aldias Agung dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
15. Sahabat penulis dari Parepare keluarga besar Nine One Enjoyable (NOBLE) dan Network, Keluarga besar FRACTION SMADA tanpa terkecuali, kita berpencar bukan untuk berpisah, tetapi untuk mengejar pendidikan, dan semoga kita dipertemukan kembali dalam kesuksesan;
16. Rekan-rekan KKN Reguler Gelombang 93 Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap atas kerjasamanya, juga kepada Posko Kelurahan Lancirang terima kasih atas amanah yang diberikan sebagai Korkel;
17. Seluruh teman-teman ASAS 2013 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

18. Guru dan Alumni TK Kartika, SDN 3 Parepare, SMPN 2 Parepare, SMAN 2 Parepare, tanpa dukungan dari proses pendidikan sekolah dasar dan menengah, penulis tidak dapat mengenyam perguruan tinggi;

19. Teman, sahabat dan keluarga yang telah memberikan dukungan, kritikan dan saran, serta doa, yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, penulis memohon maaf apabila ada yang tidak disebutkan. semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua.

Akhir kata penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa penulisan ini masih mempunyai kekurangan-kekurangan. Hal ini bukanlah kesengajaan, melainkan karena keterbatasan penulis, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya besar harapan agar skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, Januari 2017

Penulis

Azharul Nugraha Putra Paturusi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
B. Tindak Pidana Korupsi	13
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	13
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi	15
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	18
4. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	27

5. Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana	
Korupsi.....	30
C. Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN.....	35
1. Korupsi Di Bidang Perkreditan.....	36
2. Latar Belakang terjadinya Kredit Macet	38
D. Putusan Hakim.....	40
1. Pengertian Putusan Hakim	40
2. Bentuk Putusan Hakim dalam perkara Korupsi	41
3. Dasar-dasar Penjatuhan Putusan Hakim.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Lokasi Penelitian	45
B. Teknik Pengumpulan Data	45
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi	
yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara	
Dalam Putusan No. 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks	48
1. Posisi Kasus	48
2. Dakwaan Penuntut Umum	52
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	68
4. Amar Putusan	69
5. Analisis Penulis.....	77

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara Dalam Putusan: Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks	95
1. Pertimbangan Hakim	95
2. Analisis Penulis.....	114
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945¹. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary*

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

crime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.²

Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi.

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.³

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

² Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 13.

³ UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang.

Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara.

Dapat ditegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula dan berkembang di sektor pemerintahan (publik) dan perusahaan-perusahaan milik negara. Dengan bukti-bukti yang nyata dengan kekuasaan itulah pejabat publik dan perusahaan milik negara dapat menekan atau memeras para orang-orang yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁴

Korupsi pada bidang swasta juga sudah separah dengan korupsi yang terjadi pada bidang publik, bilamana aktivitas bisnisnya terkait

⁴ Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung hlm. 1

atau berhubungan dengan sektor publik, misalnya sektor perpajakan, perbankan dan pelayanan publik.

Penerapan pasal dalam UU PTPK terhadap suatu tindak pidana korupsi yang jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsurnya, sering mengalami kekeliruan penerapan baik dari jaksa, hakim maupun penasehat hukum. Terlebih apabila pelaku tindak pidana korupsinya adalah karyawan badan usaha milik negara yang mana selalu menimbulkan perbedaan pandangan dari para kalangan hukum.

Seringkali muncul perbedaan pendapat oleh kalangan hukum dalam menerapkan pasal UU PTPK. Contohnya pendapat guru besar Fakultas Hukum UI Erman Radjagukguk mengatakan bahwa kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah menjadi bagian dari kekayaan negara. Akibat kesalahpahaman dalam pengertian “kekayaan negara” ini, tuduhan tindak pidana korupsi juga mengancam Direksi BUMN. Salah pengertian atas “kekayaan negara” membuat tuduhan korupsi juga dikenakan pada tindakan-tindakan Direksi BUMN dalam transaksi-transaksi yang didalilkan dapat merugikan keuangan negara.⁵ Artinya pejabat cenderung tidak berani mengambil keputusan yang berisiko karena takut terjatuh tipikor.

⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50913e5b4d3a1/kekayaan-> diakses pada 18 Oktober 2016, pukul 21:41 WITA

Sedangkan pendapat yang mengarah bahwa penindakan korupsi di BUMN dapat dijerat pasal UU PTPK yaitu Prof Dr Nur Basuki Minarno SH Mhum, pada pernyataan bahwa direksi yang korupsi dapat dikenakan pasal 3 UU PTPK karena direksi telah menyalahgunakan wewenang. Direksi BUMN diklasifikasikan sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri. Karena itu, perbuatan melawan hukum oleh mereka adalah bentuk penyalahgunaan wewenang. Dasar hukum bahwa direksi BUMN merupakan penyelenggara negara adalah pasal 1 butir 2 UU PTPK dan penjelasan pasal 2 angka 7 UU Nomor 28 Tahun 1999.⁶

Permasalahan lainnya yang sering ditemukan dalam praktik di lapangan yaitu penerapan pasal oleh jaksa dan pengacara, maupun hakim dalam penjatuhan pasal pada suatu kasus korupsi yang terkadang tidak sesuai. Contohnya manakala suatu kasus tersebut memenuhi unsur pasal 2 UU PTPK, akan tetapi yang dijatuhkan adalah pasal 3, kemungkinan hal yang menyebabkan kejadian tersebut dapat terjadi yaitu mengingat bahwa pasal 3 mempunyai ancaman sanksi yang lebih ringan sehingga digunakan untuk meringankan pelaku.

Begitu pula sebaliknya sering terjadi pada kasus-kasus lain yang yaitu pelaku dijatuhi pasal 2 sedangkan perbuatan pelaku hanya

⁶ <http://www.antikorupsi.org/id/content/reinterpretasi-unsur-melawan-hukum> diakses pada 18 Oktober 2016, pukul 22:08 WITA

memenuhi unsur pasal 3, yaitu terpenuhi unsur perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan.

Oleh karena permasalahan tersebut, penulis mencoba mengkaji kasus korupsi yang serupa dengan penjelasan di atas, yaitu korupsi yang dilakukan oleh karyawan BUMN, dalam kasus ini BUMN dalam bentuk perbankan yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Terdakwa bernama Asmiati Khumas ST.MM. didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan penuntutan yang dilakukan secara terpisah. Dakwaan Primair dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada putusan No.41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan primair. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama pada dakwaan subsidair, dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan pada pokoknya yaitu mulusnya pemberian kredit yang dilakukan terdakwa selaku Relation Officer (RO), bersama-sama dengan Syahminal Yonnidarma selaku Pemimpin, Drs. Gusdi Hasanuddin selaku Penyelia RO dalam PT. BNI Sentra Kredit Kecil (SKC) Parepare kepada Aming Gosal selaku direktur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) walaupun terdapat penyimpangan mulai dari proses permohonan hingga tahap pencairan yaitu jaminan asli tidak dipegang oleh PT. BNI melainkan dipegang oleh Bank Niaga akan tetapi pencairan dana kredit tetap dilakukan oleh terdakwa. Kemudian ternyata dana kredit yang digunakan oleh Aming Gosal tidak sesuai dengan proposal awalnya adalah untuk renovasi Gedung Mall Of Makassar dan kredit modal kerja, namun malah digunakan untuk menebus jaminan sertifikat pada Bank Niaga dan penggunaan kepentingan pribadi Aming Gosal yang tidak sesuai peruntukannya. Perbuatan terdakwa didakwa memperkaya atau menguntungkan Aming Gosal dan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 34.690.655.139 (tiga puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap putusan ini yaitu apakah sudah tepat UU PTPK dapat dikenakan pada terdakwa sebagai karyawan dalam BUMN, dan apakah penjatuhan pasal terhadap terdakwa sudah sesuai. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul:

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai informasi bagi kalangan mahasiswa, kalangan intelektual yang berminat untuk mempelajari, mengetahui, dan mengkaji lebih lanjut mengenai proses hukum yang ditulis dalam tulisan ini.
2. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.
3. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan

bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum.

4. Bagi penulis, sebagai proses pembelajaran yang berharga dalam penulisan karya ilmiah dan menerapkan teori yang diperoleh dalam disiplin ilmu hukum, sekaligus hasil penulisan ini sebagai bahan pustaka bagi penulis utamanya dapat dipergunakan untuk mengkaji lebih lanjut tentang hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Straafbaarfeit*, yang terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *straafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *straafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *straafbaarfeit* berarti sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.⁷

Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli adalah:⁸

1. Simons:
Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.
2. Pompe:
Tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
3. Moeljatno:
Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
4. Kanter dan Sianturi:

⁷ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 5.

⁸ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung Hlm 98.

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut:⁹

1. Kesengajaan atau kelalaian.
2. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

⁹ Evi Hartanti, *Op.Cit* hlm 7

b. Unsur Objektif

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan simons merupakan rumusan yang lengkap, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹¹

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.¹²

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta hlm. 88

¹² Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 4

Istilah Korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "*corrupteia*" yang dalam bahasa Latin berarti "*bribery*" atau "*seduction*", maka yang diartikan "*corruptio*" dalam bahasa Latin ialah "*corrupter*" atau "*seducer*". "*Bribery*" dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "*seduction*" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.¹³

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain¹⁴

Menurut *Transparency Internasional* korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang

¹³ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV>.

¹⁴ Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 2

dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka¹⁵

Dalam ketentuan UU PTPK tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi:¹⁶

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berarti, Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.¹⁷

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :¹⁸

1. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-

¹⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta, hlm. 7.

¹⁶ Ermansjah Djaja, *Op.Cit* hlm 25

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Chaerudin DKK, *Op.Cit* hlm 39

masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.

2. Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
3. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.
4. Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.
5. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.
6. Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.
7. Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

Secara garis besar perbuatan terlarang dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terkualifikasi dengan sebutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Untuk lebih mudah mengingatnya, jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu:¹⁹

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 ayat 1).
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3).
3. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi (Pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b).
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi (pasal 13).

¹⁹ Guse Prayudi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, hlm 6-12

5. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b).
6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi (pasal 11).
7. Menyuiap hakim adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf a).
8. Menyuiap advokat adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf b).
9. Hakim dan Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 6 ayat 2).
10. Hakim menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf c).
11. Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf d).
12. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi (pasal 8).
13. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi (pasal 9).
14. Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf a).
15. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf b).
16. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf c).
17. Pegawai negeri memeras adalah korupsi (pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f).
18. Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain adalah korupsi (pasal 12 huruf f).
19. Pemborong berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf a).
20. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf b).
21. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf c).
22. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf d).
23. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 2).
24. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi (pasal 12 huruf h).
25. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi (pasal 12 huruf i).
26. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (pasal 12 B).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

- perbuatan melawan hukum,
- penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan pasal UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001. Secara umum dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 yaitu:

Rumusan pasal 2 ayat 1 adalah:²¹

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur pasal 2 ayat (1) adalah:²²

1. Melawan Hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

²⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> diakses pada 21 Oktober 2016 Pukul 21:30 WITA

²¹ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm 28

²² *Ibid*

Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut:

1. Melawan Hukum:

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK menjelaskan:

“Yang dimaksud dengan secara Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”

Sifat melawan hukum formal artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap telah melawan hukum.²³

Sedangkan, sifat melawan hukum materiil artinya melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.²⁴

Setelah putusan MK tanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006, membawa konsekuensi logis terhadap pengertian “melawan hukum” dalam UU PTPK. Semula, pengertian “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah

²³ Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 152

²⁴ *Ibid*

mencakup pengertian melawan hukum formiel dan materiel, menjadi pengertian melawan hukum formiel saja.²⁵

2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Dalam UU PTPK tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Untuk menelaahnya dari sudut pandang bahasa, “memperkaya...” berasal dari suku kata “kaya”. “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. “Memperkaya” artinya menjadikan lebih kaya.²⁶

Untuk dapat dikatakan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 UU PTPK diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada.²⁷

3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU PTPK dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur

²⁵ *Ibid* hlm 154

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid* hlm 155

perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.²⁸

Fokus dari delik formiel (*formiel delict*) adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiel (*materiel delict*). Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.²⁹

Dalam menganalisis unsur ketiga dari pasal 2 ayat (1) UU PTPK, perlu diuraikan beberapa pengertian, yaitu:³⁰

- Kerugian Negara;

Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kemudian, dalam pasal 59 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid* hlm 156-159

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut pidana.

- o Keuangan Negara;

Pengertian Keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penjelasan Umum UU PTPK telah memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan

perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

- **Perekonomian Negara;**

Berkenaan dengan pengertian perekonomian Negara,

Penjelasan Umum UU PTPK menjelaskan sebagai berikut:

“Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”.

Rumusan pasal 3 adalah:³¹

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Unsur-unsur pasal 3 adalah:³²

1. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut:

³¹ Evi Hartanti, *Op.Cit* hlm 28-29

³² *Ibid*

1. Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin pembuat. Unsur ini merupakan tujuan dari pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.³³

P.A.F. Lamintang mengartikan “memperoleh” keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain, atau suatu korporasi secara materiel harus terjadi. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Dari rumusan tersebut mengandung arti bahwa dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengakibatkan keuangan negara atau perekonomian negara dirugikan dan

³³ Amiruddin, *Op.Cit*, hlm 214

pelaku, orang lain, atau korporasi memperoleh keuntungan atau kekayaannya bertambah.³⁴

Bertambahnya keuntungan atau kekayaan itu harus benar-benar terjadi atau secara materiel kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang.³⁵

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Konsep penyalahgunaan wewenang (*detoournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang-wenang (*willekeur*).³⁶

Penyalahgunaan merupakan salah bentuk dari *Onrechtmatige Daad*. Penyalahgunaan wewenang merupakan *species* dari *genus*-nya *onrechtmatige daad*.

Pengertian “Penyalahgunaan Wewenang” menurut Jean Rivero dan Waline, yang diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:³⁷

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid* hlm 199

³⁷ *Ibid* hlm 200

untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain.
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Dalam hukum pidana khususnya dalam UUPTPK tidak ditemukan penjelasan konsep “penyalahgunaan wewenang”. Oleh sebab itu, untuk menjelaskan konsep penyalahgunaan wewenang ini, penulis “meminjam” konsep yang ada dalam hukum administrasi. Hal ini dimungkinkan, dengan suatu syarat jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya dapat dipergunakan. Dengan demikian, apabila pengertian “penyalahgunaan wewenang” tidak ditemukan dalam hukum

pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian atau konsep hukum yang terdapat dalam cabang hukum lain.³⁸

3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Berkenaan dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak penulis jelaskan lagi, karena pengertian unsur ini sama dengan pengertian unsur yang sama di dalam Pasal 2 UU PTPK. Penjelasan pasal 3 UU PTPK menyatakan bahwa kata : “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2.

4. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

a. Subjek Hukum Orang

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum orang ini ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:³⁹

1. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak

³⁸ *Ibid* hlm 202

³⁹ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 343-344

pidana orang pada umumnya, yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” misalnya Pasal 2, 3, 21, dan 22, tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan misalnya Pasal 5 dan 6.

2. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang *in casu* ada banyak kualitasnya pembuatnya antara lain :

1. pegawai negeri; penyelenggara negara (misalnya Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i);
2. pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat 1 huruf a);
3. hakim (Pasal 12 huruf c);
4. advokat (Pasal 12 huruf d);
5. saksi (Pasal 24); bahkan
6. tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 22 jo Pasal 28).

Menurut Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, pegawai negeri adalah meliputi :⁴⁰

1. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
2. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

⁴⁰Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui..... Op.Cit* hlm 81-82

5. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

b. Subjek Hukum Korporasi

Dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu :⁴¹

1. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka yang pengurus korporasi yang bertanggung jawab.
2. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
3. Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dibaca pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, walaupun dari ketentuan itu tidak banyak dapat diketahui karena sumirnya rumusan, tetapi Pasal 20 ini memuat beberapa ketentuan. Setidaknya ada tiga hal yang benar-benar harus dipahami oleh para praktisi hukum dalam menetapkan subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, yakni :⁴²

1. indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi;
2. secara sumir mengatur hukum acaranya;
3. mengenai pembebanan tanggung jawab pidananya.

⁴¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 345

⁴² *Ibid* hlm 346

5. Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut : ⁴³

1. Terhadap Orang yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum

⁴³ Evi Hartanti, *Op.Cit* hlm. 12-15.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 Ayat 1).

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21).

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

c. Pidana Tambahan

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

2. Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi.

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan Pasal 20 Ayat (1) sampai dengan (5) Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya;
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
- c. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain;
- d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan;
- e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

C. Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN

Pengertian Badan Usaha Milik Negara tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Bank Negara Indonesia atau PT. BNI merupakan BUMN karena memiliki saham 51% yang dimiliki oleh negara, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Maka modal Bank tersebut dikualifikasikan sebagai pengertian keuangan negara yang apabila menimbulkan kerugian dalam pengelolaannya dapat dikategorikan sebagai merugikan keuangan negara.

Pada umumnya sektor-sektor yang rawan penyimpangan dan merugikan keuangan negara yang dilakukan dalam lingkup BUMN, antara lain :⁴⁵

- a. Manipulasi kredit;
- b. Manipulasi penerbitan deposito dan penerbitan promes fiktif;
- c. Pemberian jaminan bank yang menyimpang dari prosedur;
- d. Pemberian kredit menyimpang dari prosedur dalam bank pemerintah;
- e. Manipulasi penerimaan BUMN baik dari hasil penjualan produk dan jasa;
- f. Harga / nilai kontrak terlalu tinggi (mark up dalam pengadaan barang dan jasa);

⁴⁵ I. S. Susanto, 1995, *Kejahatan Korporasi*, BP Universitas Diponegoro UNDIP, Semarang, hlm 2

- g. Penetapan pemenang lelang tidak sesuai ketentuan yang berindikasi suap atau ditetapkan oleh pengurus atau pengawas pada bagian pengadaan barang dan jasa BUMN;
- h. Pembayaran fiktif;
- i. Pemalsuan surat/dokumen sebagai sarana penyimpangan penggunaan modal BUMN;
- j. Manipulasi penggunaan barang/dana;
- k. Ketekoran kas;
- l. Manipulasi biaya pembebasan tanah;
- m. Penggunaan modal perseroan (BUMN) tidak sesuai ketentuan;
- n. Realisasi pekerjaan tidak sesuai kontrak yang merugikan perseroan (BUMN);
- o. Penggelapan uang;
- p. Manipulasi gaji pegawai (karyawan BUMN);
- q. Pungutan tidak sah;
- r. Penyalahgunaan biaya perjalanan dinas;
- s. Tidak melakukan pungutan uang negara/MPO yang menjadi kewajiban BUMN;
- t. Penyalahgunaan wewenang dalam mengambil keputusan dalam BUMN.

Aspek-aspek yang dapat ditinjau terhadap korupsi dalam BUMN, yang mana pada penulisan karya tulis ini berfokus pada PT. BNI yang merupakan BUMN berbentuk Perbankan, antara lain:

1. Korupsi Di Bidang Perkreditan

Sistem yang dianut oleh bank dalam pemberian kredit menganut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pemberian kredit didasarkan pada keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur membayar hutangnya sebagaimana yang diperjanjikan. Oleh karena itu, dalam peristiwa kredit macet, rasanya tidak adil kalau hanya semata-mata pihak nasabah saja yang dipermasalahkan, tetapi harus dikoreksi kebelakang tentang bagaimana bank sampai dapat memberikan kredit tersebut.

Dengan sistem pemberian kredit di atas, maka dengan adanya kejadian kredit macet, akan timbul pertanyaan apakah bank tidak memperoleh keyakinan yang keliru waktu itu.

Sehubungan dengan hal tersebut, jika diteliti kembali dan terdapat kegagalan pada waktu proses pemberian kredit, yang

pada akhirnya nasabah tidak mampu mengembalikan hutangnya, masalahnya bukan lagi perdata tetapi persoalan pidana.

Demikian pula pejabat bank yang mengambil keputusan pemberian kredit tidak dapat dilepaskan atas terjadinya kredit macet karena merupakan tanggung jawabnya.

Karena itu, dalam persoalan kredit macet, maka selain nasabah juga pejabat bank harus ikut mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.⁴⁶

Peraturan-peraturan mengenai kredit hanya diatur pada Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-undang No. 7 Tahun 1992. Pasal 8 berisi prinsip pemberian kredit bagi pihak bank.⁴⁷

Pasal 11 hanya memberikan penjelasan tentang kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menetapkan peraturan-peraturan mengenai:⁴⁸

1. Batas maksimum kredit;
2. Pemberian jaminan;
3. Penempatan investasi surat berharga;
4. Hal lain yang serupa;

Kredit macet adalah kasus perdata, karena hal itu merupakan sengketa antara bank dan nasabahnya mengenai utang-piutang, di mana nasabah tidak dapat mengembalikan utangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan (wanprestasi).

Karena merupakan kasus perdata, tidak semua sengketa kredit macet dapat dijadikan perkara pidana. Hanya kredit macet-kredit macet yang dilatarbelakangi dengan adanya kejahatan saja yang dapat dipidanakan.

Dalam kasus kredit macet yang murni sebagai kasus perdata, debitur tidak dapat mengembalikan kredit seperti yang diperjanjikan, karena misalnya usaha debitur tidak berhasil lantaran adanya kebijaksanaan uang ketat. Kasus yang demikian tidak dapat dipidanakan, karena dalam kasus kredit macet ini tidak ada unsur kejahatan.⁴⁹

⁴⁶ Gatot Supramono, 1997, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*, PT. Alumni, Bandung hlm v-vi

⁴⁷ *Ibid* hlm 39

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid* hlm 131-132

2. Latar Belakang Terjadinya Kredit Macet

Latar belakang terjadinya kredit macet karena adanya perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai unsur tindak pidana, yaitu sebagai berikut:⁵⁰

a. Kolusi

Kolusi adalah bentuk kerjasama yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain tetapi berakibat merugikan kepentingan umum atau negara. Perbuatan itu dilakukan sebagai jalan pintas, dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan akan sesuatu yang diharapkan.

Dalam pemberian kredit tidak terlepas adanya kolusi antara nasabah dan oknum pejabat bank, karena nasabah yang mengajukan permohonan kredit ke bank berkeinginan mendapatkan kredit yang cepat dan jumlahnya seperti yang diharapkan. Bagi pejabat bank yang tergoda iming-iming nasabah, mengusahakan pengucuran kredit yang terkadang menghalalkan segala macam cara, dan terlena akan risiko yang akan terjadi di kemudian hari.

b. Ketidaktelitian Bank dan Itikad Buruk Nasabah

Pihak bank atau karyawan bank dapat menjadi penyebab terjadinya kredit macet dapat dilakukan secara sengaja seperti tindakan ceroboh atau ketidaktelitiannya.

⁵⁰ *Ibid hlm 133-141*

Contohnya perbuatan menjaminkan surat-surat fiktif, pada waktu permohonan kredit diajukan, para terdakwa sudah ada niat berbuat tidak baik kepada bank, karena mereka sebenarnya sudah mengetahui apabila diberikan kredit nantinya akan sulit membayar kembali dan jaminannya tidak berharga sama sekali. Kejadian ini seharusnya tidak perlu terjadi, jika pejabat bank bekerja dengan sangat teliti, apa yang dijaminakan nasabah sengaja meluangkan waktu untuk mengecek kebenarannya.

c. Penyalahgunaan Pemakaian Kredit

Kemacetan kredit dapat terjadi akibat nasabah menggunakan kredit untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemakaiannya sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian kredit.

d. Nasabah dalam Bank

Sebagai pejabat bank yang kedudukannya sebagai bankir, tidak tertutup kemungkinan ia menjadi nasabah bank itu sendiri. Kalau nasabah dari dalam bank ini membutuhkan bantuan keuangan bank, yang sering terjadi aturan bank yang sehat cenderung tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga risiko yang ditanggung bank benar-benar dihadapi.

e. Kredit Fiktif

Dalam kredit fiktif berkasnya memang ada, tetapi nasabahnya tidak ada. Hal ini dapat terjadi karena ada oknum pejabat bank

yang ingin mendapatkan uang secara gampang dengan jalan pintas.

f. Hal lain

Kejadian lain yang agak sukar diduga karena jarang terjadi, apabila utang nasabah sudah dianggap lunas setelah terjadi pembayaran tetapi di kemudian hari kredit itu menjadi macet. Hal ini terjadi karena tidak melakukan pengurusan yang baik, yang disengaja oknum pejabat bank untuk kepentingan sendiri.

D. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Pengertian hakim dalam Pasal 1 butir 8 KUHP yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Dan pengertian hakim menurut UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Pengertian putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 adalah “hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai

dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan ataupun lisan”⁵¹

2. Bentuk Putusan Hakim dalam Perkara Korupsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dengan bertitik tolak kepada surat dakwaan, pembuktian, musyawarah majelis, dan mengacu pada Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka bentuk dari putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dapat berupa putusan bebas dan putusan pemidanaan.⁵²

a. Putusan Bebas

Dalam praktek putusan bebas yang lazim disebut *acquittal*, yang berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan atau dapat juga disebut terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana pada umumnya dapat dijatuhkan karena: dari pemeriksaan sidang di pengadilan, dan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Adapun menurut penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan

⁵¹ Evi Hartanti, *Op.Cit* hlm 54.

⁵² *Ibid* hlm 63-65

kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

b. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dapat terjadi apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, jika terhadap terdakwa itu tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh majelis hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana yang dilakukan diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 ayat (2) KUHP).

3. Dasar-Dasar Penjatuhan Putusan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pengambilan putusan oleh

majelis hakim dilakukan setelah hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan secara keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Jika permufakatan bulat tidak diperoleh, putusan diambil dengan suara terbanyak. Adakalanya para hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga suara terbanyakpun tidak dapat diperoleh. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa (Pasal 182 ayat (6) KUHAP).⁵³

Pasal 183 KUHAP menyatakan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, yang berarti hanya mengakui adanya alat-alat bukti yang sah yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Di luar tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah.⁵⁴

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat

⁵³ *Ibid* hlm 54-55

⁵⁴ *Ibid*

- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 26A ada tambahan mengenai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, yaitu:

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah penelitian yang akan dilaksanakan. Tempat atau lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu pada Kota Makassar. Sehubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan korupsi, maka penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar.

B. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan:

1. Teknik kepustakaan melalui studi literatur dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, hasil penelitian, tulisan-tulisan dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. Teknik wawancara dengan pihak yang terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Melalui wawancara dengan hakim dan pihak yang terkait dengan kasus tindak pidana korupsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain serta bahan lain yang digolongkan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer:

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia.

- 1) Putusan No. 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks
- 2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya tulis ilmiah, tulisan

artikel internet atau cetak dan dokumen-dokumen tentang pidana korupsi.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif yang melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara dalam Putusan No. 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks.

Membahas mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi pada kasus yang penulis teliti, maka penerapan hukum pidana materiil penulis temukan pada data dalam putusan ini yaitu dakwaan, tuntutan penuntut umum, dan amar putusan.

Sebelum membahas mengenai penerapan hukum, penulis menguraikan posisi kasus tersebut sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Pada tanggal 14 november 2009 Aming Gosal selaku Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang (PT. GMG) mengajukan permohonan kredit kepada BNI Sentra Kredit Kecil (SKC) Parepare sebesar Rp. 30 Miliar dengan perincian Rp. 10 Miliar untuk keperluan tambahan modal kerja Departemen Store dan Kredit Investasi Rp. 20 Miliar untuk keperluan renovasi Mall of Makassar.

Setelah permohonan kredit yang diajukan tersebut diterima oleh PT. BNI SKC Parepare, Selanjutnya pemimpin BNI SKC Parepare bernama Drs.

Syahminal Y, MM mendisposisi permohonan kredit tersebut kepada Drs. Gusdi Hasanuddin selaku Penyelia Relation Officer/Analisis untuk diproses.

Selanjutnya Gusdi Hasanuddin secara berjenjang menunjuk secara lisan Terdakwa Asmiati Khumas selaku Relation Officer/Analisis untuk melakukan penelitian dan melakukan *collecting* data-data pendukung lainnya guna penyusunan advis atau PAK (perangkat analisa kredit) dan setelah dilakukan analisa oleh terdakwa Asmiati Khumas, selanjutnya hasil-hasil penelitian diserahkan kepada Gusdi Hasanuddin, kemudian diserahkan kepada Syahminal selaku pemimpin BNI SKC Parepare.

Karena kredit yang dimohonkan bukan kewenangan BNI SKC Parepare untuk memutus melainkan kewenangan Kantor Wilayah PT. BNI, maka permohonan kredit dimintakan persetujuan kepada pemimpin wilayah PT. BNI Makassar.

Permohonan kredit mendapat persetujuan dari Pemimpin Wilayah BNI Makassar dengan memberikan perincian dan persyaratan yang perlu dipenuhi. Maka BNI SKC Parepare memproses lebih lanjut permohonan fasilitas kredit Aming Gosal yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kredit antara Syahminal selaku pemimpin BNI SKC Parepare dengan Aming Gosal selaku direktur PT. GMG yaitu:

1. Kredit Investasi, guna Renovasi Gedung Mall Of Makassar sebesar Rp. 19 Miliar

2. Kredit Modal Kerja, guna tambahan modal usaha Mall sebesar Rp. 10 Miliar
3. Kredit Investasi *Interest During Constraction* (IDC), guna membayar bunga Kredit Investasi renovasi Mall of Makassar sebesar Rp 1 Miliar.

Jaminan atas perjanjian kredit tersebut adalah:

1. Satu unit T/B Mall 5 lantai termasuk basement yang berlokasi di jalan Sungai Saddang, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) no. 235 tanggal 30 Oktober 1991, GS No. 576/1991 Tgl 20 September 1991;
2. Persediaan barang dagangan berupa pakaian jadi yang akan berada di departemen store yang berlokasi di Mall of Makassar akan diikat fidusia sebesar Rp 10 Miliar.

Pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian kredit antara Syahminal dengan Aming gosal jaminan berupa SHGB belum diserahkan kepada BNI SKC Parepare, jaminan masih menjadi agunan di Bank Niaga Makassar.

Setelah perjanjian kredit ditandatangani, selanjutnya Aming Gosal mengajukan permohonan pencairan KI kepada BNI SKC Parepare sebesar Rp. 19 Miliar dan oleh terdakwa Asmiati Khumas bersama Gusdi

Hasanuddin membuat memorandum kepada Syahminal untuk disetujui, dan selanjutnya dana tersebut dicairkan.

Dana dalam rekening giro PT. GMG tersebut, seharusnya tidak bisa dicairkan sampai seluruh syarat terpenuhi dan jaminan telah dikuasai oleh BNI SKC Parepare, akan tetapi dana tersebut dapat dicairkan. Kemudian dana Kredit Investasi IDC dicairkan sebesar Rp 1 Miliar mengikuti pencairan Kredit Investasi.

Untuk kredit modal kerja, tanggal 6 April 2010 diajukan permohonan pencairan sebesar Rp 10 Miliar kepada Syahminal, sehingga Syahminal menyetujui dilakukan pencairan atas dasar memorandum yang dibuat oleh Terdakwa Asmiati Khumas dan Gusdi Hasanuddin, padahal Terdakwa mengetahui bahwa renovasi Mall Of Makassar belum selesai dan belum ada kepastian waktu mulai beroperasi serta pemohon belum menyerahkan *Letter of Commitment* dari calon tenant yang akan menyewa area Mall Of Makassar sebagai syarat pencairan dana KMK.

Ternyata penggunaan pencairan kredit tidak digunakan sebagaimana proposal yang diajukan sebagaimana peruntukannya untuk renovasi Mall Of Makassar akan tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi Aming Gosal, yaitu melunasi hutang PT. GMG di Bank Niaga dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai peruntukannya.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) no. 235 tersebut telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 5 september 2011 dan sertifikat tersebut

tidak dapat diperpanjang karena adanya keberatan dari Perusda Sulawesi Selatan selaku pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian kredit dari PT BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare kepada PT Griya Maricaya Gemilang No. SR-998/D6/02/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terdapat kerugian negara dalam pemberian kredit PT Griya Maricaya Gemilang tersebut sebesar Rp. 34.690.655.139 (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

2. Dakwaan Penuntut Umum

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ASMIATI KHUMAS, ST., MM. Binti H. MUHAMMAD KHUTBAH TJONDENG selaku Analisis/Relation Officer PT. BNI (Persero) SKC Parepare bersama-sama dengan Syahminal Yonnidarma (Pemimpin Sentra Kredit Kecil (SKC) PT. BNI (Persero) Tbk Parepare), Drs. Gusdi Hasanuddin selaku Penyelia Relation Officer PT. BNI (Persero) SKC Parepare dan Aming Gosal selaku Direktur PT Griya Maricaya Gemilang (masing-masing akan dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan November 2009 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar “*melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya*

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 november 2009 Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang (PT. GMG) Sdr. Aming Gosal mengajukan kredit investasi kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk SKC Parepare sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan perincian Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk keperluan tambahan modal kerja Departemen Store dan kredit Investasi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk keperluan renovasi Mall of Makassar.
- Bahwa setelah permohonan kredit yang diajukan Aming Gosal tersebut diterima oleh PT. BNI (Persero) Tbk SKC Parepare selanjutnya Drs. Syahminal Y, MM, (selaku Pemimpin BNI SKC Parepare) memerintahkan Drs. Gusdi Hasanuddin (selaku Penyelia RO) untuk memproses dan menerima dokumen permohonan kredit berupa: Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Copy Dokumen Jaminan berupa Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kumala Celebes Putra, Akta Perusahaan, Rencana Anggaran Biaya, Penilaian Jaminan Appraisal PT. Karmino Aprakon, Laporan Keuangan Rugi/laba periode 31 Juli 2009 dan Laporan Study Kelayakan Pengoperasian Mall Of Makassar;
- Bahwa Drs. Gusdi Hasanuddin (selaku Penyelia RO) selanjutnya secara berjenjang menunjuk Terdakwa Asmiati Khumas (selaku RO/Analisis) secara lisan untuk melakukan penelitian dan melakukan collecting data-data pendukung lainnya guna penyusunan Advis atau PAK (Perangkat Analisa Kredit), Setelah dilakukan analisa oleh terdakwa Asmiati Khumas, hasil analisisnya diserahkan kepada Drs. Gusdi Hasanuddin, selanjutnya diserahkan kepada Drs. Syahminal, MM (selaku pemimpin PT. BNI SKC Parepare).
- Bahwa karena kredit yang dimohonkan bukan dalam kewenangan pada PT. BNI (Persero) Tbk SKC Parepare memutuskan, selanjutnya permohonan Kredit PT. Griya Maricaya Gemilang (Aming Gosal) sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dimintakan persetujuan kepada Pemimpin Wilayah PT. BNI (Persero) Tbk Makassar yang saat itu dijabat oleh Drs. Sukarno MBA
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 Pemimpin Wilayah BNI Makassar yaitu Drs. Sukarno MBA. Menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada PT. GMG, dengan mengeluarkan lembar disposisi pendapat unit bisnis (PEMP.W07) No. PAK: Pec/2/ tanggal 15 Desember 2009 atas nama perusahaan PT. Griya Maricaya Gemilang dengan rincian sebagai berikut:
 1. KMK maksimal sebesar Rp. 10 Milyar
 2. KI Non KUK sebesar Rp. 19 Milyar

3. KI Non KUK IDC sebesar Rp. 1 Milyar

Dengan Persyaratan antara lain:

- a. Pastikan bahwa proses dan kelengkapan serta keabsahaan pengalihan hak kepemilikan aset Mall of Makassar kepada PT. Griya Maricaya Gemilang telah dilaksanakan dengan benar dan dijamin authentic statusnya.
 - b. Disposisi Kredit Investasi (KI) untuk renovasi dapat dilaksanakan setelah pengeluaran self financing sebesar Rp. 11.581 juta direalisasikan disertai dengan bukti pengeluaran yang sah dan diserahkan kepada bank.
 - c. Pantau proses renovasi dan pastikan bahwa penggunaan kredit Investasi (KI) yang diberikan sejalan dengan tujuan, sehingga dengan fasilitas kredit investasi tersebut, mall benar-benar telah dapat dioperasikan dengan baik;
 - d. Disposisi fasilitas Kredit Modak Kerja setelah dipastikan mall siap dioperasikan disertai dengan komitmen yang bersangkutan untuk merealisasikan pengadaan sebagian barang-barang dagangan untuk mendukung kelancaran aktivitas usaha;
 - e. Mintakan kesanggupan yang bersangkutan secara tertulis untuk menyetorkan hasil sewa ke rekening yang ada di BNI sebagai kekuatan untuk membayar repayment capacity serta memperkuat modal kerja perusahaan;
 - f. Pastikan penutupan asuransi dan pengikatan barang jaminan yang menjamin keamanan BNI telah dilaksanakan sebelum disposisi diperkenankan.
- Bahwa dengan persetujuan dari Pimpinan Wilayah PT. BNI Makassar, permohonan fasilitas kredit PT. GMG ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kredit antar pemimpin sentra kredit kecil Parepare PT. BNI (Persero) yaitu Drs. Syahminal, MM dengan Aming Gosal selaku direktur PT. GMG yaitu:
1. Perjanjian kredit no.2009.166 tanggal 30 desember 2009;
 - Jenis Fasilitas : Kredit (KI)
 - Kegunaan : Renovasi Mall of Makassar yang berlokasi di jalan Sungai Saddang Komplek Latanette Plaza Makassar;
 - Plafon : Rp 19.000.000.000,00 (Sembilan belas Milyar Rupiah);
 - Jangka Waktu : Masa Pinjaman 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 s.d 29 Desember 2019, termasuk grace period selama 6 bulan;
 - Tingkat Bunga : 14, 5% selama masa grace period.
 2. Perjanjian kredit nomor 2009.167 tanggal 30 desember 2009.
 - Jenis Fasilitas : Kredit Investasi –Interest During

- Construction (KI-IDC);
- Kegunaan : Membayar bunga KI renovasi Mall Of Makassar yang berlokasi di Jalan Sungai Saddang Komplek Latanete Plaza Makassar;
- Plafon : Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah);
- Jangka waktu : Masa pinjaman 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember s/d 29 Desember 2019, termasuk grace period selama 6 bulan;
- Tingkat Bunga : 14,5 % selama masa Grace Period.
- 3. Perjanjian kredit nomor 2009.168 tanggal 30 Desember 2009.
 - Jenis Fasilitas : Kredit Modal Kerja (KMK);
 - Kegunaan : Membiayai tambahan modal kerja pengelolaan Mall of Makassar dan perdagangan pakaian jadi;
 - Plafon : Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Jangka waktu : Kredit diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 desember 2009 s/d 29 Desember 2010;
 - Tingkat bunga : 14,5% review setiap tahun.
- Bahwa jaminan atas Perjanjian Kredit adalah:
 1. 1 (satu) unit T/B Mall 5 Lantai termasuk basement yang berlokasi di Jalan Sungai Saddang Kel. Pisang Selatan kec. Ujung Pandang Kota Makassar SHGB No. 235 tanggal 30 oktober 1991, GS No. 576/1991 Tgl 20 September 1991 an. PT. Kumala Putra Celebes dengan maa berlaku s/d tanggal 5 September 2011 SHBGB akan dibalik nama menjadi an. PT. Griya Maricaya Gemiliang dan dilakukan perpanjangan hak Guna Bangunan.
 2. Persediaan barang dagangan berupa aneka pakaian jadi akan ada di departemen storre yang berlokasi di Mall Of Makassar Jl. Sungai Saddang Komplekes Latanete Plaza Makassar akan diikat fidusia sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)
- Dengan ditandatangani Perjanjian kredit tersebut, PT. GMG mengajukan permohonan pencairan KI ke PT. BNI SKC Parepare sebesar Rp. 19.000.000.000 (sembilan miliar rupiah) dan oleh Drs. Gusdi Hasanuddin Selaku Penyelia RO bersama Terdakwa Asmiati Khumas selaku RO membuat memorandum kepada pemimpin SKC Drs. Syahminal, MM. Selaku pemimpin SKC BNI Parepare untuk mendapatkan keputusan dengan memindahbukukan dana rekening

pinjaman KI nomor rekening 184642663 ke rekening giro PT. GMG nomor 184600814 sebesar Rp. 19.000.000.000 (sembilan belas miliar rupiah) yang dicairkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	6 Januari 2010	Rp.7.331.340.000	Tahap I
2.	20 Januari 2010	Rp.5.126.305.000	Tahap II
3.	11 Maret 2010	Rp.6.543.660.000	Tahap III
	Jumlah	Rp.19.001.305.000	

- Bahwa dana dalam rekening giro PT.GMG tersebut, seharusnya tidak bisa dicairkan sampai dengan seluruh syarat telah terpenuhi dan telah dikuasi oleh PT. BNI SKC Parepare, akan tetapi dana tersebut dapat dicairkan oleh Aming Gosal dan dipergunakan untuk:
 1. Menibus HGB No. 235 di PT. Bank Niaga Tbk sebesar Rp. 7.900.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah);
 2. Sebesar Rp. 5.600.000.000 (lima miliar enam ratus juta rupiah) kepada Piter Gosal untuk biaya pengurusan perpanjangan Mall;
 3. Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Supatmo;
 4. Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Syahminal;
 5. Sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa Asmiati Khumas dan Drs. Gusdi Hasanuddin masing-masing sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Aming Gosal selaku Direktur PT. GMG juga telah mencairkan kredit KI-IDC sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) mengikuti pencairan dana KI, yaitu sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	26 Januari 2010	Rp.198.987.222	Tahap I
2.	24 Februari 2010	Rp.239.943.796	Tahap II
3.	25 Maret 2010	Rp. 219.257.944	Tahap III
4.	26 April 2010	Rp. 240. 884.900	Tahap IV
5.	31 Mei 2010	Rp. 100.926. 138	Tahap V
	Jumlah	Rp. 1.000.000.000	

- Bahwa untuk Kredit Modal Kerja, Aming Gosal selaku Direktur PT. GMG pada tanggal 6 April 2010 mengajukan permohonan pencairan KMK sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) kepada Sdr. Syahminal selaku pemimpin PT. BNI SKC Parepare melalui surat no.067/GMG/IV/2010.
- Bahwa atas surat permohonan tersebut, Sdr. Syahminal menyetujui dilakukan disposisi KMK maksimal Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) melalui overbooking ke rekening giro PT. GMG nomor 184600814 dan uang kredit KMK tersebut sudah di transfer ke rekening PT. GMG atas dasar memorandum yang dibuat oleh Drs. Gusdi Hasanuddin dan terdakwa Asmiati Khumas.

- Bahwa ternyata penggunaan pencairan kredit dari BNI SKC Parepare oleh Aming Gosal Direktur PT. GMG tidak digunakan sebagaimana proposal yang diajukan sebagaimana peruntukannya untuk renovasi Gedung Mall Of Makassar, akan tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Aming Gosal, yaitu melunasi hutang PT. GMG di Bank Niaga dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan :
 1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang berbunyi “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.
 2. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang pada pokoknya berbunyi “ Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank,, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian)
 3. Pedoman Kebijakan, Organisasi dan Prosedur, Sentra Kredit Kecil, Indeks nomor: B01 – 09, Bab VI, Halaman 12 dan 13, Instruksi nomor: In/064/Ren, tanggal 04 Agustus 2009, Nama Jabatan (Relationship Officer)
 4. Pedoman kebijakan dan Prosedur Kredit Segmen Kecil Bab 01 Halaman 1 Instruksi: IN/0055/MAR/ tanggal 22 Juni 2005.
 5. Pedoman Kebijakan, Organisasi dan Prosedur Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Besar Sentra Kredit Kecil Indeks : B01-09 Bab VI halaman 12 Instruksi : IN/064/REN tanggal 04 Agustus 2009.
 6. Pedoman Kebijakan, Organisasi dan Prosedur Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Besar Sentra Kredit Kecil Indeks : B01-09 Bab VI halaman 12 Instruksi : IN/064/REN tanggal 04 Agustus 2009.
 7. Pedoman Kebijakan, Organisasi dan Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku I Bab Analisa Kredit Sub Bab Struktur Fasilitas Kredit Sub Sub Bab Pengikatan jaminan Indeks C02-02 Bab I Sub Bab G Sub Sub Bab) 4 halaman 1 Instruksi: IN/0316/PMR tanggal 11 Desember 2000 angka 4 huruf c pada pokoknya dijelaskan bahwa jangka waktu masing-masing hak atas tanah (Khusus untuk HGB, HGU dan HP) tidak lebih pendek dari jangka waktu kreditnya.
 8. Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor: PEC/2/1159/R tgl 30 Desember 2009.
 9. Perjanjian Kredit nomor 2009.168 tanggal 30 Desember 2009 pasal 3 yaitu Bank memberi fasilitas kredit kepada penerima kredit berupa KI dengan tujuan untuk renovasi Mall Of Makassar.

10. Perjanjian Kredit nomor 2009.167 dan nomor 2009.168 pasal 8 tentang penarikan kredit.

- Bahwa sertifikat HGB No. 235 tersebut telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 5 September 2011 dan HGB No. 235 tersebut tidak dapat diperpanjang dan tidak dapat dibalik namakan kepada PT. GMG karena keberatan dari Perusda Sulawesi Selatan selaku pemegang HPL.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. Syahminal, MM dan Drs. Gusdi Hasanuddin telah memperkaya Aming Gosal sebesar Rp. 26.491.227.540 (dua puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau sebesar Rp. 34.690.655.139 (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian kredit dari PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare kepada PT. Griya Maricaya Gemilang No. SR-998/D6/02/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp. 34.690.655.139 (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ASMIATI KHUMAS, ST, MM, Binti H. MUHAMMAD KHUTBAH TJONDENG selaku Analisis/Relation Officer PT. BNI (Persero) SKC Parepare bersama-sama dengan Syahminal Yonnidarma (Pemimpin Sentra Kredit Kecil (SKC) PT. BNI (Persero) Tbk Parepare), Drs. Gusdi Hasanuddin selaku Penyelia Relation Officer PT. BNI (Persero) SKC Parepare dan Aming Gosal selaku Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang (masing-masing akan dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan November 2009 atau setidaknya pada suatu

waktu dalam tahun 2009 sampai dengan dalam tahun 2010 bertempat di Kantor PT. BNI (Persero) SKC Parepare Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, "*melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*" yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Relationship Officer berdasarkan Pedoman Kebijakan, Organisasi dan Prosedur, Sentra Kredit Kecil, Indeks Nomor: 801-09, Bab VI, halaman 12 dan 13, Instruksi Nomor: In/064/Ren, tanggal 04 Agustus 2009, Nama Jabatan (Relationship Officer) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

I. IKHTISAR JABATAN

Bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pemasaran, analisa kelayakan kredit serta penyusunan struktur fasilitas serta pemantauan jalannya perkreditan lancar dan menjaga kualitas potepel kredit dengan maksimum sesuai dengan batas kewenangannya.

II. TANGGUNG JAWAB UTAMA

Berperan aktif dengan penyeliaan atasannya dalam kegiatan:

1. Melaksanakan kegiatan pemasaran kredit usaha kecil dan membina hubungan terhadap debitur/calon debitur:
 - Menyusun peta bisnis berdasarkan struktur pendapatan, struktur pengeluaran, sektor ekonomi, struktur demografi dan bidang usaha;
 - Menyusun target, rencana dan kegiatan pemasaran produk kredit usaha kecil serta melakukan *cross selling* produk-jasa BNI secara terkoordinir dengan unit-unit terkait;
 - Mencari, menemukan, membuka peluang dan mendorong terealisasinya transaksi bisnis yang dapat memberikan kontribusi bagi Sentra Kredit Kecil dan unit lain di BNI;
 - Memantau realisasi program dan rencana kerja pemasaran;
 - Mengelola administrasi/file usulan kredit, target pemasaran data base sistem informasi debitur/calon debitur;
 - Membina hubungan baik dengan debitur kelolaannya;
2. Melaksanakan aktivitas perkreditan debitur/calon debitur:

- Mengumpulkan, memverifikasi dan memnuhi kelengkapan data calon debitur/debitur yang diperlukan untuk proses analisa kredit;
 - Melakukan input data permohonan kredit calon debitur/debitur;
 - Pengelolaan kegiatan informasi bank debitur/calon debitur (meminta dan memberikan informasi pada pihak-pihak terkait, misalkan info BI);
 - Melakukan kunjungan setempat (*on the spot*) ke tempat debitur/calon debitur dan pihak 2 yang terkait dalam rangka pengumpulan data serta verifikasi data yang diperlukan berkaitan dengan permohonan kredit yang masuk;
 - Memastikan kebenaran, kejelasan, keabsahan dan kelengkapan data permohonan kredit;
 - Melakukan analisa Laporan/Proyeksi Keuangan dan aspek-aspek terkait lainnya terhadap usaha calon debitur/debitur;
 - Membuat analisa kebutuhan kredit calon debitur/debitur;
 - Menyusun struktur fasilitas kredit;
 - Memberikan pendapat atas hasil analisa berbagai aspek penilaian kredit seperti kewajaran jumlah maksimum kredit, penilaian agunan dan kelayakan usaha;
 - Membuat surat penolakan jika permohonan kredit dinilai tidak layak diproses/disetujui.
3. Memantau perjalanan kredit debitur kolektibilitas I dan II:
- Membuat jadwal kunjungan debitur dan rencana dalam rangka pemantauan;
 - Memantau kegiatan usaha debitur dan keberadaan barang agunan sesuai perubahan yang terjadi;
 - Melakukan pemantauan usaha debitur secara kontinyu sesuai ketentuan dan segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan golongan kredit tetap lancar;
 - Membantu menyelesaikan permasalahan mengenai dokumentasi & pelaksanaan kredit;
 - Mengelola kualitas portepel kredit kelolaannya dan mengupayakan debitur kelolaannya tetap dalam kualitas PL;
 - Memantau dan menganalisa perkembangan realisasi kredit secara efektif;
 - Memantau mutasi/aktivitas rekening, prestasi pembayaran kewajiban debitur, kolektibilitas pinjaman serta klasifikasi debitur;
 - Mencermati daftar debitur/rehabilitasi debitur macet dari Bank Indonesia;

- Menyusun laporan penagihan, kesanggupan debitur dan alasan lainnya yang terkait dengan proses penyelesaian kewajiban dari masing-masing debitur
 - Menghubungi debitur untuk menyelesaikan tunggakan kewajibannya;
 - Menyusun memorandum pengeseran kolektibilitas dan Memorandum Analisa Penyelamatan (MAP) serta Memorandum Penetapan Strategi (MPS) debitur Golongan I dan/atau II yang mengalami penurunan kolektibilitas ke Golongan III/IV/V dan menyerahkannya ke Unit Kredit Khusus.
4. Melakukan koordinasi atau proses administrasi, dokumentasi, dll yang terkait dengan pelaksanaan pemberian fasilitas kredit kepada debitur.
- Selain itu Pengelola Pemasaran (Relationship Officer) berdasarkan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Segmen Kecil Bab Persetujuan Kredit Buku I Indeks CO2-02 BAB II Sub Bab II Sub Sub Bab 01 Halaman 1 Instruksi: IN/0055/MAR tanggal 22 Juni 2005 tanggung Jawab dan wewenang Pengelola Pemasaran (Relationship Officer):
- **TANGGUNG JAWAB:**
 - Membuat Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) untuk nasabah-nasabah yang dikelolanya:
 - Meneliti apakah diperlukan persetujuan khusus Kelompok Pemutus Kredit (KPK) yang berwenang.
 - Mengikuti proses persetujuan PAK/Memo dan memastikan bahwa semua persetujuan KPK yang berwenang telah diperoleh.
 - Membuat memo penolakan.
 - Membuat Surat Keputusan Kredit dan memo Pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana.
 - Menghadiri penandatanganan Perjanjian Kredit (PK)/Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK).
 - Menetapkan jumlah dan obyek pengikatan barang jaminan.
 - Menetapkan jumlah dan obyek penutupan asuransi barang jaminan.
 - Menerima klaim asuransi termasuk kelengkapan dokumen dari nasabah yang dikelolanya.
 - Membuat check list syarat disposisi kredit.
 - Membuat memorandum pelepasan/penggantian jaminan.
 - Membuat memorandum Sub Alokasi.
 - Membuat memorandum tambahan kredit sementara.
 - Membuat memo perpanjangan kredit sementara.
 - Bahwa selain itu berdasarkan Pedoman Kebijakan, Organisasi dan Prosedur Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Besar Sentra Kredit Kecil Indeks: B01-09 Bab VI halaman 12 instruksi: IN/064//REN

tanggal 04 agustus 2009 dijelaskan bahwa Tanggungjawab Utama Terdakwa antara lain::

- Melaksanakan aktivitas perkreditan debitur/calon debitur yaitu:
 - Mengumpulkan, memverifikasi dan memenuhi kelengkapan data calon debitur/debitur yang diperlukan untuk proses analisa kredit.
 - Melakukan input data permohonan calon debitur/debitur.
 - Mengelola kegiatan informasi bank debitur/calon debitur (meminta dan memberikan informasi pada pihak terkait, misalkan info Bank Indonesia)
 - Melakukan kunjungan setempat (*on the spot*) ke tempat usaha debitur/calon debitur dan pihak ke-2 yang terkait dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi data yang diperlukan berkaitan dengan permohonan kredit yang masuk.
 - Memastikan kebenaran, kejelasan, keabsahan dan kelengkapan permohonan kredit yang masuk.
 - Memastikan kebenaran, kejelasan, keabsahan dan kelengkapan permohonan kredit.
 - Melakukan analisa laporan/proyeksi keuangan dan aspek-aspek terkait lainnya terhadap usaha calon debitur/debitur.
 - Membuat analisa kebutuhan kredit calon debitur/debitur.
 - Menyusun struktu fasilitas kredit.
 - Memberikan pendapat atas hasil analisa berbagai aspek penilaian kredit seperti kewajaran jumlah maksimum kredit, penilaian agunan dan kelayakann usaha.
 - Membuat surat penolakan jika permohonan kredit dinilai tidak layak diproses/disetujui.
- Memantau perjalanan kredit debitur kolektibilitas I dan II antara lain:
 - Membuat jadwal kunjungan debitur dan rencana dalam rangka pemantauan.
 - Memantau kegiatan usaha debitur dan keberadaan barang agunan sesuai perubahan yang terjadi.
 - Melakukan pemantauan usaha debitur secara kontinyu sesuai ketentuan dan segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan golongan kredit tetap lancar.
 - Membantu menyelesaikan permasalahan mengenai dokumentasi dan pelaksanaan kredit.
 - Mengelola kualitas portepel kredit kelolaannya dan mengupayakan debitur kelolaannya tetap dalam kualitas PL.
 - Memantau dan menganalisa perkembangan realisasi kredit secara efektif.
 - Memantau mutasi/aktifitas rekening, prestasi pembayaran kewajiban debitur, kolektibilitas pinjaman, serta klasifikasi debitur.

- Mencermati daftar debitur/rehabilitasi debitur macet dari Bank Indonesia.
- Melakukan proses koordinasi atas proses administrasi, dokumentasi dan lainnya terkait dengan pelaksanaan pemberian fasilitas kredit pada debitur.
- Bahwa pada tanggal 14 november 2009 Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang (PT. GMG) Sdr. Aming Gosal mengajukan kredit investasi kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk SKC Parepare sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan perincian Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk keperluan tambahan modal kerja Departemen Store dan kredit Investasi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk keperluan renovasi Mall of Makassar.
- Bahwa setelah permohonan kredit yang diajukan Aming Gosal tersebut diterima oleh PT. BNI (Persero) Tbk SKC Parepare selanjutnya Drs. Syahminal Y, MM, (selaku Pemimpin BNI SKC Parepare) memerintahkan Drs. Gusdi Hasanuddin (selaku Penyelia RO) untuk memproses dan menerima dokumen permohonan kredit berupa: Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Copy Dokumen Jaminan berupa Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kumala Celebes Putra, Akta Perusahaan, Rencana Anggaran Biaya, Penilaian Jaminan Appraisal PT. Karmindo Aprakon, Laporan Keuangan Rugi/laba periode 31 Juli 2009 dan Laporan Study Kelayakan Pengoperasian Mall Of Makassar;
- Bahwa Drs. Gusdi Hasanuddin (selaku Penyelia RO) selanjutnya secara berjenjang menunjuk Terdakwa Asmiati Khumas (selaku RO/Analisis) secara lisan untuk melakukan penelitian dan melakukan collecting data-data pendukung lainnya guna penyusunan Advis atau PAK (Perangkat Analisa Kredit), Setelah dilakukan analisa oleh terdakwa Asmiati Khumas, hasil analisisnya diserahkan kepada Drs. Gusdi Hasanuddin, selanjutnya diserahkan kepada Drs. Syahminal, MM (selaku pemimpin PT. BNI SKC Parepare).
- Bahwa karena kredit yang dimohonkan bukan dalam kewenangan pada PT. BNI (Persero) Tbk SKC Parepare memutuskan, selanjutnya permohonan Kredit PT. Griya Maricaya Gemilang (Aming Gosal) sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dimintakan persetujuan kepada Pemimpin Wilayah PT. BNI (Persero) Tbk Makassar yang saat itu dijabat oleh Drs. Sukarno MBA.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 Pemimpin Wilayah BNI Makassar yaitu Drs. Sukarno MBA. Menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada PT. GMG, dengan mengeluarkan lembar disposisi pendapat unit bisnis (PEMP.W07) No. PAK: Pec/2/ tanggal 15 Desember 2009 atas nama perusahaan PT. Griya Maricaya Gemilang dengan rincian sebagai berikut:
 1. KMK maksimal sebesar Rp. 10 Milyar

2. KI Non KUK sebesar Rp. 19 Milyar
3. KI Non KUK IDC sebesar Rp. 1 Milyar

Dengan Persyaratan antara lain:

- a. Pastikan bahwa proses dan kelengkapan serta keabsahaan pengalihan hak kepemilikan asel Mall of Makassar kepada PT. Griya Maricaya Gemilang telah dilaksanakan dengan benar dan dijamin authentic statusnya.
 - b. Disposisi Kredit Investasi (KI) untuk renovasi dapat dilaksanakan setelah pengeluaran self financing sebesar Rp. 11.581 juta direalisasikan disertai dengan bukti pengeluaran yang sah dan diserahkan kepada bank.
 - c. Pantau proses renovasi dan pastikan bahwa penggunaan kredit Investasi (KI) yang diberikan sejalan dengan tujuan, sehingga dengan fasilitas kredit investasi tersebut, mall benar-benar telah dapat dioperasikan dengan baik;
 - d. Disposisi fasilitas Kredit Modak Kerja setelah dipastikan mall siap dioperasikan disertai dengan komitmen yang bersangkutan untuk merealisasikan pengadaan sebagian barang-barang dagangan untuk mendukung kelancaran aktivitas usaha;
 - e. Mintakan kesanggupan yang bersangkutan secara tertulis untuk menyetorkan hasil sewa ke rekening yang ada di BNI sebagai kekuatan untuk membayar repayment capacity serta memperkuat modal kerja perusahaan;
 - f. Pastikan penutupan asuransi dan pengikatan barang jaminan yang menjamin keamanan BNI telah dilaksanakan sebelum disposisi diperkenankan.
- Bahwa dengan persetujuan dari Pemimpin Wilayah PT. BNI Makassar, permohonan fasilitas kredit PT. GMG ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kredit antar pemimpin sentra kredit kecil Parepare PT. BNI (Persero) yaitu Drs. Syahminal, MM dengan Aming Gosal selaku direktur PT. GMG yaitu:
1. Perjanjian kredit no.2009.166 tanggal 30 desember 2009;
 - Jenis Fasilitas : Kredit (KI)
 - Kegunaan : Renovasi Mall of Makassar yang berlokasi di jalan Sungai Saddang Komplek Latanette Plaza Makassar;
 - Plafon : Rp 19.000.000.000,00 (Sembilan belas Milyar Rupiah);
 - Jangka Waktu : Masa Pinjaman 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 s.d 29 Desember 2019, termasuk grace period selama 6 bulan;
 - Tingkat Bunga : 14, 5% selama masa grace period.
 2. Perjanjian kredit nomor 2009.167 tanggal 30 desember 2009.

- Jenis Fasilitas : Kredit Investasi –Interest During Construction (KI-IDC);
- Kegunaan : Membayar bunga KI renovasi Mall Of Makassar yang berlokasi di Jalan Sungai Saddang Komplek Latanete Plaza Makassar;
- Plafon : Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah);
- Jangka waktu : Masa pinjaman 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember s/d 29 Desember 2019, termasuk grace period selama 6 bulan;
- Tingkat Bunga : 14,5 % selama masa Grace Period.
- 3. Perjanjian kredit nomor 2009.168 tanggal 30 Desember 2009.
 - Jenis Fasilitas : Kredit Modal Kerja (KMK);
 - Kegunaan : Membiayai tambahan modal kerja pengelolaan Mall of Makassar dan perdagangan pakaian jadi;
 - Plafon : Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Jangka waktu : Kredit diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 desember 2009 s/d 29 Desember 2010;
 - Tingkat bunga : 14,5% review setiap tahun.
- Bahwa jaminan atas Perjanjian Kredit adalah:
 1. 1 (satu) unit T/B Mall 5 Lantai termasuk basement yang berlokasi di Jalan Sungai Saddang Kel. Pisang Selatan kec. Ujung Pandang Kota Makassar SHGB No. 235 tanggal 30 oktober 1991, GS No. 576/1991 Tgl 20 September 1991 an. PT. Kumala Putra Celebes dengan maa berlaku s/d tanggal 5 September 2011 SHBGB akan dibalik nama menjadi an. PT. Griya Maricaya Gemiliang dan dilakukan perpanjangan hak Guna Bangunan.
 2. Persediaan barang dagangan berupa aneka pakaian jadi akan ada di departemen storre yang berlokasi di Mall Of Makassar Jl. Sungai Saddang Komplekes Latanete Plaza Makassar akan diikat fidusia sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)
- Dengan ditandatanganinya Perjanjian kredit tersebut, PT. GMG mengajukan permohonan pencairan KI ke PT. BNI SKC Parepare sebesar Rp. 19.000.000.000 (sembilan miliar rupiah) dan oleh Drs. Gusdi Hasanuddin Selaku Penyelia RO bersama Terdakwa Asmiati Khumas selaku RO membuat memorandum kepada pemimpin SKC Drs. Syahminal, MM. Selaku pemimpin SKC BNI Parepare untuk

mendapatkan keputusan dengan memindahbukukan dana rekening pinjaman KI nomor rekening 184642663 ke rekening giro PT. GMG nomor 184600814 sebesar Rp. 19.000.000.000 (sembilan belas miliar rupiah) yang dicairkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	6 Januari 2010	Rp.7.331.340.000	Tahap I
2.	20 Januari 2010	Rp.5.126.305.000	Tahap II
3.	11 Maret 2010	Rp.6.543.660.000	Tahap III
	Jumlah	Rp.19.001.305.000	

- Bahwa dana dalam rekening giro PT.GMG tersebut, seharusnya tidak bisa dicairkan sampai dengan seluruh syarat telah terpenuhi dan telah dikuasi oleh PT. BNI SKC Parepare, akan tetapi dana tersebut dapat dicairkan oleh Aming Gosal dan dipergunakan untuk:
 1. Menebus HGB No. 235 di PT. Bank Niaga Tbk sebesar Rp. 7.900.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah);
 2. Sebesar Rp. 5.600.000.000 (lima miliar enam ratus juta rupiah) kepada Piter Gosal untuk biaya pengurusan perpanjangan Mall;
 3. Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Supatmo;
 4. Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Syahminal;
 5. Sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa Asmiati Khumas dan Drs. Gusdi Hasanuddin masing-masing sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Aming Gosal selaku Direktur PT. GMG juga telah mencairkan kredit KI-IDC sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) mengikuti pencairan dana KI, yaitu sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	26 Januari 2010	Rp.198.987.222	Tahap I
2.	24 Februari 2010	Rp.239.943.796	Tahap II
3.	25 Maret 2010	Rp. 219.257.944	Tahap III
4.	26 April 2010	Rp. 240. 884.900	Tahap IV
5.	31 Mei 2010	Rp. 100.926. 138	Tahap V
	Jumlah	Rp. 1.000.000.000	

- Bahwa untuk Kredit Modal Kerja, Aming Gosal selaku Direktur PT. GMG pada tanggal 6 April 2010 mengajukan permohonan pencairan KMK sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) kepada Sdr. Syahminal selaku pemimpin PT. BNI SKC Parepare melalui surat no.067/GMG/IV/2010.
- Bahwa atas surat permohonan tersebut, Sdr. Syahminal menyetujui dilakukan disposisi KMK maksimal Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) melalui overbooking ke rekening giro PT. GMG nomor 184600814 dan uang kredit KMK tersebut sudah di transfer ke rekening PT. GMG atas dasar memorandum yang dibuat oleh Drs. Gusdi Hasanuddin dan terdakwa Asmiati Khumas.

- Bahwa ternyata penggunaan pencairan kredit dari BNI SKC Parepare oleh Aming Gosal Direktur PT. GMG tidak digunakan sebagaimana proposal yang diajukan sebagaimana peruntukannya untuk renovasi Gedung Mall Of Makassar, akan tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Aming Gosal, yaitu melunasi hutang PT. GMG di Bank Niaga dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas beentangan dengan :
 1. Pedoman Kebijakan, Organisasi dan Prosedur, Sentra Kredit Kecil, Indeks nomor: B01 – 09, Bab VI, Halaman 12 dan 13, Instruksi nomor: In/064/Ren, tanggal 04 Agustus 2009, Nama Jabatan (Relationship Officer)
 2. Pedoman kebijakan dan Prosedur Kredit Segmen Kecil Bab 01 Halaman 1 Instruksi: IN/0055/MAR/ tanggal 22 Juni 2005.
 3. Pedoman Kebijakan, Organisasi dan Prosedur Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Besar Sentra Kredit Kecil Indeks : B01-09 Bab VI halaman 12 Instruksi : IN/064/REN tanggal 04 Agustus 2009.
 4. Pedoman Kebijakan, Organisasi dan Prosedur Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Besar Sentra Kredit Kecil Indeks : B01-09 Bab VI halaman 12 Instruksi : IN/064/REN tanggal 04 Agustus 2009.
 5. Pedoman Kebijakan, Organisasi dan Prosedur Kredit Segmen Kecil Buki I Bab Analisa Kredit Sub Bab Struktur Fasilitas Kredit Sub Sub Bab Pengikatan jaminan Indeks C02-02 Bab I Sub Bab G Sub Sub Bab) 4 halaman 1 Instruksi: IN/0316/PMR tanggal 11 Desember 2000 angka 4 huruf c pada pokoknya dijelaskan bahwa jangka waktu masing-masing hak atas tanah (Khusus untuk HGB, HGU dan HP) tidak lebih pendek dari jangka waktu kreditnya.
 6. Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor: PEC/2/1159/R tgl 30 Desember 2009.
 7. Perjanjian Kredit nomor 2009.168 tanggal 30 Desember 2009 pasal 3 yaitu Bank memberi fasilitas kredit kepada penerima kredit berupa KI dengan tujuan untuk renovasi Mall Of Makassar.
 8. Perjanjian Kredit nomor 2009.167 dan nomor 2009.168 pasal 8 tentang penarikan kredit.
- Bahwa sertifikat HGB No. 235 tersebut telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 5 September 2011 dan HGB No. 235 tersebut tidak dapat diperpanjang dan tidak dapat dibalik namakan kepada PT. GMG karena keberatan dari Perusda Sulawesi Selatan selaku pemegang HPL.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. Syahminal, MM dan Drs. Gusdi Hasanuddin telah memperkaya Aming Gosal sebesar Rp. 26.491.227.540 (dua puluh enam miliar empat

ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau sebesar Rp. 34.690.655.139 (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian kredit dari PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare kepada PT. Griya Maricaya Gemilang No. SR-998/D6/02/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp. 34.690.655.139 (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Asmiati Khumas, ST.MM. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 23 Desember 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ASMIATI KHUMAS, S.T., M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana "**Dakwaan Primair**" Pasal 2 ayat (1) UU. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa ASMIATI KHUMAS, S.T., M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam "**Dakwaan Subsidiar**" Pasal 3 UU. No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU. No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMIATI KHUMAS, S.T., M.M. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :⁵⁵
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

4. Amar Putusan / Dictum

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ASMIATI KHUMAS, S.T., M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ASMIATI KHUMAS, S.T., M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *korupsi yang dilakukan secara bersama-sama* sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar copy surat dari Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Tanggal 14 November 2009 perihal Permohonan Kredit.
 2. 1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Tanggal 6 Januari 2009 perihal Permohonan Disposisi KI, beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya dan Kuitansi kuitansi.
 3. 3 (tiga) lembar copy Memorandum dari Unit RO ke PPK Bisnis No. PEC/02/217A tanggal 16 November 2009 perihal Segmentasi Calon Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang.

⁵⁵ Disebutkan dalam amar putusan.

4. 2 (dua) lembar copy Call Memo atas nama Nasabah PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 10 Desember 2009.
5. 1 (satu) bendel copy Formulir Berita Acara Transaksi Agunan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare tanggal 10 Desember 2009 atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG).
6. 2 (dua) lembar copy Evaluasi Potensi Resiko & Mitigasinya atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 16 Desember 2009.
7. 2 (dua) lembar copy Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) atas nama debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 13 Desember 2009.
8. 1 (satu) bendel copy Formulir Laporan Kunjungan Setempat atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 15 Desember 2009.
9. 1 (satu) bendel copy Formulir Informasi Dasar (FID) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 15 Desember 2009.
10. 1 (satu) bendel copy Formulir Analisa Keuangan (FIK) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang.
11. 1 (satu) bendel copy Checklist Uji Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit (FAK) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang tanggal uji kepatuhan 15 Desember 2009.
12. 2 (dua) lembar copy Formulir Analisa Resiko / Rating (FAR/PAK-02.C) atas nama debitur PT> Griya Maricaya Gemilang Periode Rating tanggal 15 Desember 2009.
13. 2 (dua) lembar copy Lembar Disposisi atas nama debitur PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor PAK PEC/2/ tanggal 15 Desember 2009.
14. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : 2009.166 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jadwal Angsutran Pokok Kredit.
15. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : 2009.167 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jadwal Angsuran Pokok Kredit.
16. 1 (satu) copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : 209.168 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran jaminan yang diserahkan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
17. 1 (satu) bendel copy surat dari Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) Nomor : PEC/2/1159/R tanggal 30 Desember 2009 perihal Keputusan Kredit.
18. 2 (dua) lembar copy surat dari pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk kepada Hendrik Jaury, SH Notaris & PPAT Nomor : PEC/6/1169A/R tanggal 31 Desember 2009

perihal Pengikatan Hak Tanggungan, Pengikatan Borgtogcht Notariil, Pengikatan SL, dan Surat Pernyataan Notariil.

19. 2 (dua) lembar copy call memo atas nama Nasabah PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 31 Desember 2009 untuk Tujuan Call Verifikasi Pengikatan Notaris.
20. 1 (satu) copy memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/272 tanggal 31 Desember 2009 perihal Disposisi KI an. PT. Griya Maricaya Gemilang beserta laporannya.
21. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/013 tanggal 18 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an. PT. Griya Maricaya Gemilang.
22. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/017 tanggal 19 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an. PT. Griya Maricaya Gemilang.
23. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/018 tanggal 20 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an. PT. Griya Maricaya Gemilang.
24. 3 (tiga) lembar copy Memorandum dari unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/021 tanggal 21 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an. PT. Griya Maricaya Gemilang.
25. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/103 tanggal 11 Maret 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an. PT. Griya Maricaya Gemilang.
26. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Regional Remedial & Recovery Makassar kepada Perusda Sulsel Nomor : RMV/9/3.2/1125 tanggal 30 Oktober 2013 perihal Permintaan Konfirmasi.
27. 1 (satu) lembar copy Surat dari Perusda Sulsel kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Regional Remedial & Recovery Makassar Nomor : 166/DIR/XI/2013 tanggal 15 November 2013 perihal Permintaan Konfirmasi.
28. 3 (tiga) lembar copy Engineering Estimate Proyek Revitalisasi Mall Of Makassar yang dibuat pihak Interdeco Rancangbangun tanggal 15 November 2009.
29. 1 (satu) bendel copy Penilaian Properti dari PT. Karmino Apprakon Nomor : 06.288/KA/LP/CL/09 tanggal 12 Juli 2009.
30. 1 (satu) bendel copy Project Monitoring Report Proyek Revitalisasi Mall of Makassar PT. Griya Maricaya Gemilang periode 4 Januari 2010 tentang Laporan Pengawasan Proyek Revitalisasi Mall of Makassar pertanggal 4 Januari 2010 tanggal 27 Februari 2010.
31. 3 (tiga) lembar copy cover note dari Notaris Hendrik Jaury, SH nomor : 5/KN/I/2010 tanggal 5 Januari 2010.
32. 1 (satu) bendel copy rancangan gambar Mall of Makassar dari Perencana Interdeco Rancangbangun.
33. 1 (satu) bendel copy Job Discription Building Management Mall of Makassar (MOM).
34. 1 (satu) bendel copy Laporan Study Kelayakan Pengoperasian Mall of Makassar (Take Over Mayofield Mall) milik PT. Griya Maricaya Gemilang.

35. 1 (satu) bendel copy Rencana Anggaran Biaya Mall of Makassar dari perencana Interdeco Rancanganbangun.
36. 1 (satu) bendel copy akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor: 378 tanggal 31 Juli 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang.
37. 1 (satu) bendel copy akta notaris Ny. Ira Sudjono, SH, M.Hum. M.Kn Nomor : 53 tanggal 20 februari 2008 perihal Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Griya Maricaya Gemilang.
38. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor : 114 tanggal 12 Agustus 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang.
39. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH nomor : 75 tanggal 4 Desember 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang.
40. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Hendrik Jaury, SH Nomor : 01 tanggal 5 januari 2010 perihal Akta Berita Acara Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham.
41. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Hendrik Jaury, SH Nomor : 02 tanggal 5 januari 2010 perihal Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee)
42. 1 (satu) bendel copy Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor : 233/2010 tanggal 5 mei 2010
43. 1 (satu) bendel copy Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 1/KUP/2010 tanggal 5 januari 2010.
44. 1 (satu) bendel copy surat dari wakil pemimpin PT. Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare nomor : PEC/6/582/R Tanggal 12 Mei 2011.
45. 1 (satu) bendel Copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan no. 235 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Ujungpandang.
46. 2 (dua) lembar copy Sertifikat Hak Tanggungan no. 5767/2011 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Ujungpandang.
47. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Kehilangan Dokumen dari Pihak PT. Bank BNI (Persero) Tbk tanggal 28 maret 2012.
48. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH nomor : 378 tanggal 31 juli 2009 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang.
49. 10 (sepuluh) lembar copy Memorandum no. PEC/2/158 tanggal 23-04-2010 perihal disposisi KMK an. PT. Griya Maricaya Gemilang.
50. 9 (sembilan) lembar copy Memorandum No. PEC/2/003 tanggal 06-01-2010 perihal disposisi KI an. PT. Griya Maricaya Gemilang.
51. 1 (satu) lembar copy call memo tanggal 24-03-2010 antara Asmiati Khumas dengan Imas (PT. Agung Raya Sentosa) dan Aris (Pemilik PT. Agung Raya Sentosa) dengan tujuan : Verifikasi pemasok pakaian jadi PT. GMG.
52. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 24-03-2010 antara Asmiati Khumas dengan PD. Megah Perkasa dan Sosro (Pemilik PD. Megah Perkasa) dengan tujuan : Verifikasi pemasok pakaian jadi PT. GMG.

53. 1 (satu) lembar copy surat PT. GMG nomor : 067/GMG/IV/2010 tanggal 06 April 2010 perihal permohonan penarikan KMK
54. 1 (satu) lembar copy surat/kuitansi PT. Agung Raya Sentosa tanggal 15 April 2010 sebesar Rp. 17.188.200.000,-
55. 1 (satu) lembar copy surat/invoice no : LCJO234078 dari PD. Megah Perkasa tanggal 15 April 2010 sebesar Rp. 12.042.390.000,-
56. 1 (satu) lembar copy call memo tanggal 11-03-2010 antar Gusdi Hasanuddin dan Asmiati Khumas dengan Aming Gosal dengan tujuan : Verifikasi perkembangan proyek revitalisasi Mall of Makassar s/d tgl 06-03-2010.
57. 1 (satu) lembar copy call memo tanggal 18-01-2010 antara Drs. Syahminal, Gusdi Hasanuddin dan Asmiati Khumas dengan Aming Gosal dengan tujuan : Verifikasi perkembangan proyek revitalisasi Mall of Makassar s/d tgl 17-01-2010.
58. 1 (satu) lembar copy call memo tanggal 18-01-2010 antara Asmiati Khumas dengan Bpk. Agus (staf Konsultan KJPP Arief dan rekan di Makassar) dengan tujuan : verifikasi perkembangan proyek revitalisasi Mall Of Makassar s/d tgl 17-01-2010.
59. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 18-01-2010 antara Gusdi Hasanuddin, Rafidah Abu Rais dan Muh. Firdaus dengan Aming Gosal dengan tujuan : laporan kunjungan setempat ke Mall Of Makassar.
60. 1 (satu) lembar copy surat PT. GMG nomor : 007/GMG/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 perihal permohonan penarikan KI.
61. 1 (satu) lembar copy surat PT. GMG nomor : 006/GMG/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 perihal permohonan Penarikan KI.
62. 3 (tiga) lembar copy surat IDI History BU nomor: 16/164023606/DPIP/PIK tgl. 18-11-2014
63. 2 (dua) lembar copy surat IDI History BU nomor: 16/164023543/DPIP/PIK tgl. 18-11-2014
64. 10 (sepuluh) lembar copy rekening koran no. 0184646226 (rek. IDC) an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009 s/d 18/11/2014.
65. 10 (sepuluh) lembar copy rekening koran no. 0184649680 (rek. Pinjaman KMK) an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009 s/d 18/11/2014
66. 11 (sebelas) lembar copy rekening koran no. 0184642663 (rek. Pinjaman KI) an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009 s/d 18/11/2014.
67. 6 (enam) lmebar copy laporan (riwayat rekening pinjaman) off balance sheet rekening no. 0184646226, 0184649680, 0184642663 an. PT. Griya Maricaya Gemilang.
68. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Maricaya Gemilang nomor: 015/DIR/II/2013 tanggal 4 februari 2013 perihal Tanggapan atas Surat Permohonan Surat Rekomendasi Perpanjangan Hak Guna Bangunan.
69. 2 (dua) lembar copy surat Kadiv Legal Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor: 116/D-HK/VI/2012 tanggal 8juni 2012 perihal Penyampaian.

70. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Maricaya Gemilang nomor: 061/DIR/III/2012 tanggal 28 maret 2012.
71. 3 (satu) lembar copy surat direktu PT. Maricaya Gemilang kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan nomor: 072/GMG/IX/2011 tanggal 23 september 2011 perihal penegasan Pengelolaan Kawasan Ruko Kompleks Latanete Plaza (sekarang Mall Of Makassar).
72. 1 (satu) lembar copy Surat dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 539/2011/EKON tanggal 1 April 2010 perihal Persetujuan Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Latanete Plaza.
73. 2 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan nomor: 091/DIR/III/2012 tanggal 4 maret 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Hak Pengelolaan Latanete Plaza selama 20 Tahun.
74. 2 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan nomor: 074/DIR/II/2010 tanggal 18 februari 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Hak Pengelolaan Latanete Plaza selama 20 Tahun.
75. 3 (tiga) lembar copy surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Ketua Badan Pengawas Perusda Sulawesi Selatan Nomor: 387.a/DIR/XII/2009 tanggal 3 desember 2009 perihal Permohonan Persetujuan Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Latanete Plaza.
76. 3 (tiga) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty UP. Kuasa Direktur Utama Sdr. Aming Gosal nomor: 267/DIR/VIII/2009 tanggal 2 september 2009 perihal Penawaran Rencana Pengelolaan Mall Latanete Plaza.
77. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kerjasama Pembagian Keuntungan (Profitsharing) dan Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan "Bangunan Serba Guna (Plaza) dan Kompleks Toko toko Hunian (Ruko) Perkantoran / Pertokoan, Tempat Parkir Diatas Tanah Eks Hotel Anging Mamiri di Jalan Sungai Saddang Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang nomor: 030/DIR/IV/90 – 151/PPR/AP/IV/90 tanggal 11 April 1990.
78. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH nomor: 76 tanggal 15 agustus 1990 perihal Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil (profit Sharing Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Gedung Guna (Plaza) dan Kompleks Rumah Toko (Ruk/Perkantoran/Pertokoan, serta Perparkiran Diatas Tanah Eks Hotel Angin Mamiri Jalan Sungai Saddang Ujung Pandang.
79. 1 (satu) bendel copy akta notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH nomor: 18 tanggal 9 April 1991 perihal Perjanjian Bersama Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Milik Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.

80. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Sri Hartini Widjaja, SH nomor: 05 tanggal 2 maret 1994 perihal Perjanjian Pengoperan dan Kerja Sama Bagi Hasil Pembangunan "La Tanete Plaza"
81. 1 (satu) bendel copy Nota Kesepahaman Bersama Antara Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dengan PT. Griya Maricaya Gemilang tentang Pengelolaan Latanete Plaza di Makassar tanggal 14 Desember 2009.
82. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Abdul Muis, SH, MH nomor: 111 tanggal 15 April 2010 perihal Adendum Terhadap Perjanjiann Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan dengan PT. Griya Maricaya Gemilang (Dahulu bernama PT. Hari Darmawan Realty) tentang Pengelolaan Mall Of Makassar (Eks Latanete Plaza).
83. 1 (satu) nedel copy Buku Tanah Hak Pengelolaan nomor 1 Desa/Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten/Kotamdya Ujung Pandang Propinsi Sulawesi Selatan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Ujung Pandang.
84. 1 (satu) bendel copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.
85. 1 (satu) bendel copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan nomor 5 tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.
86. 1 (satu) bendel copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan nomor 12 Tahun 2006 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan nomor 5 tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah.
87. 1 (satu) copy bendel Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor: 3264/IX/Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direksi dan Badan Pengawas Perusda Lingkup Pemerintah Propinsi SulSel.
88. 1 (satu) bendel copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor : 56/I/Tahun 2010 tanggal 6 januari 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.
89. 2 (dua) lembar copy surat dari Direktur Utama PT. Hari Hari Darmawan Realty kepada Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan nomor: 240/Perusda-HDR/IV/2009 tanggal 24 April 2009.
90. 1 (satu) bendel copy surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan nomor: 03/Perusda-HDR/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Proposal Kelanjutan Kerjasama dengan Perusda.
91. 1 (satu) lembar copy surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan nomor: 14/Perusda-HDR/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Konsep Baru dan Kelanjutan Pengelolaan Latanete Plaza.
92. 1 (satu) lembar copy surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan

nomor: 01/Perusda-HDR/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Pengambilalihan Pengelolaan Latanete Plaza.

93. 1 (satu) lembar copy surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty nomor: 002/DIR/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Peringatan Tentang Kerjasama Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete.
94. 1 (satu) lembar copy surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty nomor: 041/DIR/II/2009 tanggal 25 februari 2009 tentang Peringatan II Tentang Kerjasama Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete.
95. 2 (dua) lembar copy surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty nomor: 154/DIR/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Peringatan Ketiga dan Penghentian Kerjasama Pengelolaan Latanete Plaza.
96. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah dari Direktur Utama Pperusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Staf Perusahaan Daerah nomor: 173/DIR/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009.
97. 2 (dua) lembar copy Perjanjian Pembagian Keuntungan Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete nomor: 320/DIR/PDSS/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 antara Perusahaan Daerah dengan Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty.
98. 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Aming Gosal tanggal 12 juni 2009 untuk melakukan perundingan (negosiasi) sehubungan dengan Pembatalan Perjanjian Kerjasama antar PT. Hari Darmawan Realty dengan Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.
99. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Kepada Pengelola Latanete Plaza nomor: 177//DIR/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Penempatan Personil Perusda Sulsel di Latanete Plaza.
100. 1 (satu) bendel copy surat dari Konsultan Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi tangaal 26 Oktober 2009 perihal Legal Opini Atas Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Mall Latanete Plaza.
101. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Fasilitas Mayofield Mall Realty tanggal 22 juli 2009.
102. 1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur Utama PT. Griya Mmaricaya Gemilang kepada Direktur Utama Perusda nomor: 002/HDR/IX/2009 tnggal 18 september 2009 perihal Jawaban dan Persetujuan Kelanjutan Kerjasama Pengelolaan Mall Latanete Plaza.
103. 1 (satu) lembar copy Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Aming Gosal melalui Bank BCA kepada Bank Cimb Niaga Cabang A Yani Kota Makassar Sebesar Rp7.906.074.424,00 tanggal 30 Maret 2010 untuk Pelunasan Latanete Plaza.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (*Lima Ribu Rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2016, oleh IBRAHIM PALINO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, KRISTIYAN P. DJATI, S.H. dan DR. ABDUL RAZAK, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh RAHMAD, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh RISAL NURUL FITRI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

5. Analisis Penulis

Yang dimaksud dengan hukum pidana materil. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil sebagai berikut:⁵⁶

Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

sedangkan menurut J.M. Van Bammelen:⁵⁷

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancam terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Membahas mengenai penerapan pasal pada tindak pidana, maka hal ini berkaitan erat dengan tahap penuntutan. Pasal 143 KUHP yang menyatakan bahwa untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan. Asmiati Khumas selaku karyawan PT.BNI/BUMN didakwa oleh Jaksa penuntut

⁵⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, hal 9.

⁵⁷ *Ibid*

umum dengan menggunakan ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini berarti jaksa meyakini bahwa perbuatan terdakwa selaku karyawan BUMN/PT. BNI termasuk dalam kategori perbuatan tindak pidana korupsi.

Namun sebelumnya, perbedaan anggapan dari kalangan BUMN berpendapat bahwa kekayaan negara yang dipisahkan maka kekayaan tersebut masuk dalam ranah hukum privat bukan lagi masuk dalam hukum publik, sehingga kekayaan tersebut bukan lagi kekayaan negara melainkan kekayaan perseroan. Namun kalangan Kejaksaan, berpendapat bahwa kekayaan negara yang dipisahkan kedalam suatu perseroan tetap merupakan kekayaan negara, hal ini mendasarkan pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa keuangan negara termasuk juga uang yang dipisahkan di BUMN.

Maka untuk menjawab kendala tersebut di atas, maka akan dibuktikan penerapan hukum pidana materiil sebagaimana tuntutan jaksa bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, karena apabila terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi membuktikan bahwa perbuatan karyawan ini merupakan tindak pidana korupsi. Terdakwa dihadapkan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidair. Yakni Primair Pasal 2 ayat (1), subsidair Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Adapun bunyi rumusan pada pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yaitu:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).”

Sedangkan rumusan pada pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yaitu:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Jaksa menitikberatkan tuntutananya pada dakwaan subsidair yaitu pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 akan tetapi bertitik tolak dari hukum acara yang berlaku karena dakwaan disusun secara subsidair maka penulis akan memulai dari dakwaan primair, setelah itu dilanjutkan pada dakwaan subsidair. Berikut ini akan dibuktikan pasal-pasal yang berkaitan dengan dakwaan jaksa penuntut umum yaitu:

1. **Primair:** Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana. Maka unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Setiap Orang;

Unsur setiap orang disini adalah setiap manusia atau termasuk korporasi sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ada terungkap alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidananya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Asmiati Khumas ST, MM. Adalah seorang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Di dalam persidangan juga telah diteliti identitas terdakwa dan terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*).

Pada kasus ini, terdakwa adalah seorang pegawai atau karyawan Bank BNI yang diangkat berdasarkan SK Direksi PT BNI (Persero) yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau menerima gaji dari suatu korporasi yang menerima bantuan atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Dengan demikian karena terdakwa adalah seorang pegawai dalam jabatan atau kedudukan sebagai pelaku

maka memenuhi kriteria salah satu unsur yang disyaratkan yaitu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi.

b. Dengan Melawan Hukum;

Unsur melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil. Tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No: 003/PPU-IV/2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengenai sifat melawan hukum materiil tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga yang masih berlaku hanyalah melawan hukum dalam arti formil.

Berdasarkan perbuatan Terdakwa, mulai dari proses permohonan hingga pencairan dana kredit kepada Aming Gosal, meninjau dari uraian dakwaan di atas bahwa seharusnya Terdakwa Asmiati Khumas melakukan penolakan atas permohonan dan pencairan kredit tersebut karena tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pemberian fasilitas kredit. Sehingga perbuatan Terdakwa melanggar peraturan Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 yang berbunyi "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". Kemudian Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 yang pada pokoknya berbunyi "Bank wajib memelihara tingkat

kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian”.

Akan tetapi mengenai unsur ini penuntut umum dalam surat tuntutananya berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terbukti. Berdasarkan surat dakwaan, Terdakwa Asmiati Khumas, ST, MM. Didakwa dalam jabatannya atau kedudukannya selaku Analis/Relation Officer (RO) PT. BNI SKC Parepare, berangkat dari hal tersebut menunjukkan bahwa subjek delik menurut dakwaan penuntut umum adalah dalam kualitas sebagai pejabat atau orang yang mempunyai kedudukan;

Karena terdakwa didakwa dalam kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan yaitu sebagai Analisis/Relation Officer PT. BNI (Persero) SKC Parepare dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT Griya Maricaya Gemilang (PT GMG) dan karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, maka sesuai azas *lex specialis derogat legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tersebut yang lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair haruslah

dianggap tidak terpenuhi dan Terdakwa sudah selayaknya dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Karena dakwaan primair dinyatakan tidak terpenuhi, maka selanjutnya penulis akan membuktikan dakwaan subsidair sesuai dengan tuntutan jaksa dan amar putusan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair yaitu sebagai berikut:

2. **Subsidair:** Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

a. Setiap Orang;

Unsur setiap orang telah dibuktikan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas sehingga tidak perlu diuraikan lagi pada bagian ini. Unsur setiap orang dalam Pasal 3 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Karena Unsur pokok dari pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka unsur ad. 3 tersebut lebih dahulu akan dibahas.

- b. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menyalahgunakan kewenangan artinya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Sedangkan menyalahgunakan sarana terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.⁵⁸

Menyalahgunakan kesempatan artinya adanya penyalahgunaan waktu atau kesempatan pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan atau jabatan.⁵⁹

Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukannya.

Karena maksud dari menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang berarti Terdakwa memangku jabatan atau kedudukan oleh karena itu pelaku tindak pidana korupsi haruslah seorang pejabat/pegawai negeri. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tersebut, pegawai negeri meliputi:

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian ;

⁵⁸ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm 51-52

⁵⁹ Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik, dan Masalahnya*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-I, PT. Alumni, Bandung, hlm 93

- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP ;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau negara;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan atau fasilitas dari negara atau masyarakat;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Berdasarkan fakta di persidangan bahwa Asmiati Khumas benar adalah seorang pegawai atau karyawan Bank BNI yang diangkat berdasarkan SK Direksi PT BNI (Persero) yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau menerima gaji dari suatu korporasi yang menerima bantuan atau fasilitas dari negara atau masyarakat, dengan demikian Asmiati Khumas adalah seorang pegawai dalam jabatan atau kedudukan selaku Analis/Relation officer PT.BNI (Persero) SKC Parepare.

Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu bermula saat Terdakwa Asmiati Khumas selaku Relation Officer/Analis diberikan oleh Gusdi Hasanunddin kewenangan, tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penelitian dan melakukan *collecting* data-data pendukung lainnya guna penyusunan advis atau PAK (perangkat analisa kredit).

Pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dengan Pemohon yaitu Aming gosol jaminan berupa SHGB belum diserahkan kepada BNI SKC Parepare, jaminan masih menjadi agunan di Bank Niaga Makassar.

Pada saat perjanjian kredit ditandatangani, selanjutnya Aming Gosal mengajukan permohonan pencairan KI kepada BNI SKC Parepare sebesar Rp. 19 Miliar dan oleh terdakwa Asmiati Khumas membuat memorandum untuk disetujui, dan selanjutnya dana tersebut dicairkan.

Dana dalam rekening giro PT. GMG tersebut, seharusnya tidak bisa dicairkan sampai seluruh syarat terpenuhi sebagaimana telah diuraikan di dakwaan serta jaminan telah dikuasai oleh BNI SKC Parepare, akan tetapi dana tersebut dapat dicairkan. Kemudian dana Kredit Investasi IDC dicairkan sebesar Rp 1 Miliar mengikuti pencairan Kredit Investasi.

Untuk kredit modal kerja, tanggal 6 April 2010 Aming Gosal mengajukan permohonan pencairan sebesar Rp 10 Miliar, sehingga Syahminal menyetujui dilakukan pencairan atas dasar memorandum yang dibuat oleh Terdakwa Asmiati Khumas dan Gusdi Hasanuddin, padahal Terdakwa mengetahui bahwa renovasi Mall Of Makassar belum selesai dan belum ada kepastian waktu mulai beroperasi serta pemohon belum menyerahkan *Letter of Commitment* dari calon tenant yang akan menyewa area Mall Of Makassar sebagai syarat pencairan dana KMK.

Ternyata penggunaan pencairan kredit tidak digunakan sebagaimana proposal yang diajukan sebagaimana peruntukannya

untuk renovasi Mall Of Makassar akan tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi Aming Gosal, yaitu melunasi hutang PT. GMG di Bank Niaga dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai peruntukannya.

Dari uraian diatas maka perbuatan terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan yaitu dimana ketika permohonan kredit tersebut diproses oleh Analis/RO sampai kredit tersebut disetujui bahkan sampai tahap pencairan, telah ternyata asli dokumen jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 235 belum ada, dan hal itu sudah diketahui oleh Terdakwa sebagaimana diterangkan saksi Asmiati Khumas dalam persidangan bahwa hasil call memo tanggal 31 Desember 2009 tentang fakta bahwa sertifikat nomor 235 masih terikat hak tanggungan di Bank CIMB Niaga.

Karena merupakan persyaratan mutlak lengkapnya dokumen yang diperlukan sebelum permohonan kredit disetujui, maka manakala belum ada, maka tidak ada solusi lain lain selain menunda atau menolak pemberian fasilitas kredit tersebut. Dimana syarat-syarat belum dipenuhi sebelum permohonan kredit disetujui, maka sudah nyata bahwa tindakan Terdakwa tersebut jelas merupakan suatu penyimpangan.

Dari uraian perbuatan terdakwa seharusnya Terdakwa langsung menolak permohonan kredit tersebut apapun resikonya apabila belum

memenuhi persyaratan yang ditentukan, apalagi kedudukan Terdakwa selaku Analis/RO adalah bersifat mandiri atau Independen yang tentu menempatkan Terdakwa dalam posisi menentukan layak tidaknya permohonan itu untuk diproses sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang selaku Analis/RO. Karena dengan posisi yang independen yang dimiliki Analis/RO, Penyelia, Pemimpin SKC maupun Pemimpin Wilayah dan seterusnya, tentu memiliki kewenangan masing-masing untuk menerima atau menolak layak tidaknya permohonan kredit itu diproses dan disetujui. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas terkait dengan unsur ini, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

- c. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Perbuatan yang dilarang dalam unsur pasal ini adaah bersifat alternatif, tidak mutlak semuanya harus dibuktikan, cukup salah satu saja apakah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata “tujuan” dalam unsur ini dapat dimaknai sebagai maksud atau sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Fakta dalam perkara ini bahwa terkait dengan pencairan kredit sebesar Rp. 19.000.000.000,- tersebut, dimana seharusnya pencairan

tersebut haruslah berdasarkan bobot atau progres pekerjaan, namun kenyataannya kredit tersebut tetap dicairkan walaupun tidak berdasarkan bobot pekerjaan. Ternyata setelah dana yang sudah dicairkan PT Griya Maricaya Gemilang tersebut sebahagian telah dipergunakan oleh Aming Gosal untuk menebus Sertifikat HGB No. 235 di PT Bank Niaga Tbk, yang seharusnya digunakan seluruhnya renovasi gedung Mall of Makassar sehingga tujuan pemberian kredit menjadi tidak tercapai yang berarti Aming Gosal memperoleh keuntungan.

Mulusnya pemberian kredit kepada PT Griya Maricaya Gemilang meskipun terdapat point-point penyimpangan dalam proses pemberian dan penggunaan kredit tersebut sebagaimana diuraikan di atas, menjadi bukti adanya kesengajaan Terdakwa untuk memaknai kata dengan maksud menguntungkan dalam unsur ini untuk menguntungkan orang lain yaitu PT Griya Maricaya Gemilang;

Terdakwa yang sudah berpengalaman di bidang perbankan, tentu sudah memikirkan kemungkinan terburuk yang dapat terjadi manakala terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pemberian kredit tersebut, namun Terdakwa tetap memprosesnya, sehingga unsur *mens rea* dalam perbuatan Terdakwa terpenuhi. Dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.

d. Unsur yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Yang dimaksud kerugian negara dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yaitu:

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Pengertian Keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah:

“Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 lebih dahulu memberi penafsiran terhadap pengertian keuangan negara yaitu:

- a. seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sebagaimana penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 di atas, juga dikuatkan pada pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yaitu:

“kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa PT. BNI (Persero) SKC Parepare merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara. Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara berbunyi :

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dari perbuatan Asmiati Khumas selaku karyawan pada PT. BNI SKC Parepare bersama-sama dengan Drs. Syahminal, MM dan Drs. Gusdi Hasanuddin telah menguntungkan Aming Gosal selaku direktur PT. Griya Maricaya Gemilang yang menjadi pemohon kredit. Sebagaimana laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP sebesar Rp. 34.690.655.139. Dasar kewenangan BPKP melakukan penghitungan kerugian negara yaitu Perpres No. 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang pada intinya BPKP berwenang untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

Maka dari itu, karena PT. BNI SKC Parepare adalah merupakan sarana dan prasarana pemerintah untuk mengelola keuangan negara sehingga apabila PT. BNI tersebut mengalami kerugian, secara otomatis keuangan negara atau perekonomian negara mengalami kerugian. Berdasarkan uraian di atas, maka unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi.

Selain dari uraian di atas, mengenai kredit macet yang menyebabkan kerugian negara tidak dengan sendirinya dapat dikatakan sebagai korupsi. Untuk menilai kredit macet, dapat dilihat dari beberapa perspektif. Apabila penyebabnya di luar kekuasaan karyawan bank dan debitor, contohnya lemahnya arus perekonomian, bencana ataupun krisis moneter, barulah bisa dikatakan persoalan hukumnya adalah murni perdata. Apabila dikatakan korupsi, maka harus ada unsur kesengajaan, merugikan keuangan negara, melakukan perbuatan melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kalau penyebab kredit macet terjadi karena penyalahgunaan kredit, pelanggaran dalam proses penyaluran kredit dan pelanggaran terhadap peraturan, baik itu peraturan perundangan-undangan terkait ataupun peraturan dalam bank tersebut, maka bisa dikatakan pidana.

Untuk dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, maka kerugian negara tersebut timbul karena adanya perbuatan melawan hukum, dan untuk memperkaya diri sendiri

atau orang lain atau korporasi. Sedangkan, di Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 kerugian negara yang timbul karena pegawai negeri menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Mengenai kasus pada putusan ini, dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 3 berdasarkan dari uraian dan pembahasan di atas, maka telah terjawab bahwa perbuatan karyawan BUMN tersebut merupakan suatu tindak pidana korupsi. Karena telah dibuktikan bahwa perbuatan dari karyawan ini merupakan perbuatan menyalahgunakan wewenangnya agar terwujudnya pencairan kredit sehingga pemohon kredit mendapatkan keuntungan dari cairnya kredit tersebut yang menyebabkan kerugian negara. Sehingga berdasarkan uraian di atas bahwa benar perbuatan terdakwa adalah suatu tindak pidana korupsi karena memenuhi unsur pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Selanjutnya, penulis uraikan mengenai Pasal yang di juncto kan yaitu Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyangkut pidana tambahan, walaupun terdakwa mempunyai peran dalam terjadinya kerugian negara, namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti maupun petunjuk tidak ada yang dapat membuktikan bahwa terdakwa telah memperoleh uang atau harta benda

dari kerugian Negara tersebut, dengan demikian terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti.

Selanjutnya mengenai penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berikut, konteks penyertaan (*deelneming*) dalam perkara Terdakwa hanyalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti orang yang turut serta melakukan perbuatan itu. Dari rangkaian fakta di persidangan telah tergambar dengan jelas bahwa terwujudnya delik karena adanya kerjasama antara Syahminal Yonnidarma selaku pemimpin SKC, Terdakwa Asmiati Khumas selaku Analis/RO, Gusdi Hasanuddin selaku Penyelia dan Aming Gosal selaku pemohon kredit. Dimana pihak-pihak yang terlibat tersebut tentu berangkat dari niat yang sama yakni terwujudnya pemberian kredit kepada PT Griya Maricaya Gemilang. walaupun mereka sudah tahu dan menyadari bahwa terdapat hal-hal yang seharusnya dipenuhi sebelum pencairan kredit tersebut dilakukan sebagaimana telah diuraikan di atas, karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum.

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan penulis di atas maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memang benar bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti menurut hukum, telah sesuai dan memenuhi unsur delik. Penulis sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara Dalam Putusan: Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks.

1. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan

Dalam memutus suatu perkara terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh hakim sebagai dasar dalam mengadili terdakwa. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks. sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis pada yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan penuntut umum.

Menimbang, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidair, yaitu:

- Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Subsidiar : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hukum acara yang berlaku karena dakwaan disusun secara subsidair maka pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan primair, dimana unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan primair penuntut umum lebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif didasarkan pada asas-asas keadilan atau asas-asas hukum tidak tertulis yang bersifat umum, sedangkan dalam fungsi positif didasarkan atas asas kepatutan dalam masyarakat dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela atau merusak keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor: 003/PPU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai sifat melawan hukum materiil tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga yang masih berlaku hanyalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini penuntut umum dalam surat tuntutan maupun Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, ternyata sama-sama berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terbukti, dengan argumentasi hukumnya masing-masing.;

Menimbang, bahwa dari pandangan hukum Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana tertuang dalam tuntutan maupun pembelaannya, Majelis akan memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dakwaan penuntut umum, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Asmiati Khumas, ST.MM., didakwa dalam jabatan atau kedudukan selaku Analis/Relation Officer (RO) PT.BNI (Persero) SKC Parepare dalam hal ini menunjukkan bahwa subyek delik menurut dakwaan penuntut umum adalah dalam kulaitas sebagai pejabat atau orang yang mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu

bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materil. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dalam kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan yaitu sebagai selaku Analisis/Relation Officer PT. BNI (Persero) SKC Parepare dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT Griya Maricaya Gemilang (PT GMG) dan karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, maka sesuai azas *lex specialis derogat legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut yang lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair haruslah dianggap tidak terpenuhi dan Terdakwa sudah selayaknya dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diuraikan di atas yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ad 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Pasal 3 jo Pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorangan yang memegang suatu jabatan atau kedudukan yang menurut hukum kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, haruslah seorang pejabat/pegawai negeri. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 undang-Undang tersebut, pegawai negeri meliputi:

- f. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian ;
- g. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP ;

- h. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau negara;
- i. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan atau fasilitas dari negara atau masyarakat;
- j. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada tahun 2009 terdakwa adalah seorang pegawai atau karyawan Bank BNI yang diangkat berdasarkan SK Direksi PT BNI (Persero) yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau menerima gaji dari suatu korporasi yang menerima bantuan atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa adalah seorang pegawai dalam jabatan atau kedudukan sebagai selaku memenuhi kriteria untuk melakukan tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai pengamatan Majelis selama persidangan berlangsung, telah ternyata Terdakwa seorang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena unsur pokok dari Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka unsur ad. 3 tersebut lebih dahulu akan dipertimbangkan.

Ad 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari elemen perbuatan apakah itu “menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan ataukah sarana yang ada padanya” telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis akan memberikan pertimbangan berikut ini dengan terlebih dahulu akan diuraikan konsep *onbevoegheid* yakni tindakan yang melanggar wewenang atau tindakan tanpa dasar wewenang.

Menimbang, bahwa sesuai asas legalitas yang mendasari setiap tindakan hukum pemerintah di bidang publik, berarti tindakan itu harus didasarkan pada wewenang yang berasal dari peraturan perundang-undangan, jika tindakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang atau bertindak tanpa memiliki wewenang, maka tindakan itu tergolong

tindakan yang melanggar wewenang yang pada hakikatnya tindakan tersebut tidak memiliki legitimasi, dengan demikian ketika organ pemerintah tidak memiliki wewenang dalam melakukan tindakan hukum, berarti melakukan tindakan dalam bidang yang tidak termasuk wewenangnya berarti pula melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa organ pemerintah yang menggunakan wewenang untuk tujuan lain berarti telah menyalahgunakan wewenang, penyalahgunaan wewenang dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

- 1) Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan diri sendiri, kelompok atau golongan;
- 2) Penyalahgunaan wewenang dalam arti tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan dan kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
- 3) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian di atas, maka dalam konteks perkara *a quo* yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi dalam Pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus dilakukan oleh Subyek Pelaku Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku ;

Menimbang, bahwa kata "*kewenangan*" berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki kewenangan tertentu pula. Dengan kewenangannya tersebut, maka akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan "*kesempatan*";

Menimbang, bahwa seseorang dengan jabatan atau kedudukannya tertentu akan memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat digunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu. Bila kemudian rambu-rambu itu dilanggar atau jika kewenangan, kesempatan dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena kesempatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa uraian di atas akan menjadi rujukan Majelis dalam menilai apakah Terdakwa dapat dikualifikasi telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana harus kedudukan yang inheren pada diri Terdakwa yaitu sebagai selaku Analisis/Relation Officer PT. BNI (persero) SKC Parepare dalam pemberian kredit kepada PT Griya Maricaya Gemilang (Aming Gosal), maka Majelis akan mengetengahkan fakta-fakta hukum yang relevan yang terungkap dalam perkara ini dikaitkan dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sehubungan dengan pembayaran harga tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini bahwa Bahwa pada tanggal 14 Nopemer 2009 Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang (PT. GMG) Aming Gosal mengajukan permohonan kredit kepada PT. BNI (Persero) Tbk SKC Parepare sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) dengan perincian Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) untuk keperluan tambahan modal kerja Departemen Store dan kredit investasi Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) untuk keperluan renovasi Mall of Makassar ;

Bahwa sebelum permohonan kredit ke SKC Parepare, Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang (PT. GMG) Aming Gosal mengajukan permohonan kredit kepada PT. BNI (Persero) Tbk SKM Makassar, namun karena Supatmo yang bekerja di PT BNI (Persero) Tbk SKC Parepare, maka kemudian atas saran Supatmo permohonan kredit tersebut diajukan di PT. BNI (Persero) Tbk SKC Parepare ;

Bahwa setelah permohonan kredit yang diajukan Aming Gosal tersebut diterima oleh PT. BNI (Persero) Tbk SKC Parepare selanjutnya Drs. Syahminal Y, MM, selaku pemimpin BNI SKC Parepare medisposisi permohonan kredit tersebut kepada Drs. Gusdi Hasanuddin selaku Penyelia RO untuk diproses ;

Bahwa sebagai kelengkapan permohonan kredit tersebut, maka Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang (PT. GMG) Aming Gosal telah melampirkan dokumen permohonan kredit dan terima oleh oleh SKC Parepare waktu itu adalah berupa : Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Copy Dokumen Jaminan berupa Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kumala Celebes Putra, Akta Perusahaan, Rencana Anggaran Biaya, Penilaian Jaminan Appraisal PT. Karmindo Aprakon, Laporan Keuangan Rugi/laba periode 31 Juli 2009 dan Laporan Study Kelayakan Pengoperasian Mall Of Makassar;

Bahwa selanjutnya Drs. Gusdi Hasanuddin (selaku Penyelia RO) secara berjenjang menunjuk Terdakwa Asmiati Khumas (selaku RO/Analisis) secara lisan untuk melakukan penelitian dan melakukan collecting data-data pendukung lainnya guna penyusunan Advis atau PAK (Perangkat Analisa Kredit), Setelah dilakukan analisa oleh terdakwa Asmiati Khumas, hasil analisisnya diserahkan kepada Drs. Gusdi Hasanuddin, selanjutnya diserahkan kepada Drs. Syahminal, MM (selaku pemimpin PT. BNI SKC Parepare).

Menimbang, bahwa karena kredit yang dimohonkan bukan dalam kewenangan pada PT. BNI (Persero) Tbk SKC Parepare memutuskan, selanjutnya permohonan Kredit PT. Griya Maricaya Gemilang (Aming Gosal) sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dimintakan persetujuan kepada Pemimpin Wilayah PT. BNI (Persero) Tbk Makassar yang saat itu dijabat oleh Drs. Sukarno MBA

Menimbang, bahwa karena kredit yang dimohonkan bukan dalam kewenangan pada PT. BNI (Persero) Tbk SKC Parepare untuk memutuskan, selanjutnya permohonan Kredit PT. Griya Maricaya Gemilang (Aming Gosal) sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar) dimintakan persetujuan kepada Pemimpin Wilayah PT. BNI (Persero) Tbk Makassar yang saat itu dijabat oleh Drs. Sukarno, MBA.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi Asmiati Khumas dan saksi ahli bahwa sesungguhnya Aming Gosal (Direktur PT Griya Maricaya Gemilang) berada dalam satu group dengan PT CV Matahari Putra dan PT Matahari Sinar Plastindo sehingga dari segi Segmentasi kredit, tidak dimungkinkan apabila Aming Gosal (PT Griya Maricaya Gemilang) mengajukan permohonan kredit melalui PT BNI (Persero) SKC Parepare melainkan melalui harus PT BNI (Persero) SKM Makassar, karena jumlah kredit yang sudah diajukan oleh group tersebut sudah melebihi plafon kredit yang dapat diajukan di PT BNI (Persero) SKC Parepare. Demikian pula, jika kredit yang dimohonkan Aming Gosal selaku Direktur Griya Maricaya Gemilang jika dikumulasikan dengan perusahaan Aming Gosal (PT Griya Maricaya Gemilang), maka seharusnya bukan lagi kewenangan Kantor wilayah PT BNI (Persero)

Makassar untuk memutuskannya melainkan sudah menjadi kewenangan PT BNI (Persero) Kantor Pusat di Jakarta ;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa Asmiati Khumas sudah menyarankan hal itu melalui memo yang dibuatnya, namun permohonan kredit dari PT GMG tetap diproses lebih lanjut oleh SKC Parepare, sehingga dari prosedur pemberian kredit di BNI, hal itu jelas sudah merupakan suatu penyimpangan yang dilakukan baik oleh SKC Parepare (dalam hal ini Terdakwa, Gusdi Hasanuddin dan Asmiati Khumas) maupun BNI Wilayah Sulselbar dalam hal ini pemimpinnya yaitu Drs. Sukarno, MBA yang tetap memproses kredit yang diajukan oleh Aming Gosal tersebut, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT BNI, dimana kewenangan SKC maksimum kredit untuk individual Rp. 10 Milyar dan untuk group maksimum Rp. 15 milyar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah fakta dalam perkara ini bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 Pemimpin Wilayah BNI Makassar yaitu Drs. Sukarno, MBA menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada PT GMG, dengan mengeluarkan lembar disposisi pendapat unit bisnis (PEMP. W07) No. PAK : PEC/2/ Tanggal 15 Desember 2009 atas nama perusahaan PT. Griya Maricaya Gemilang dengan rincian sebagai berikut:

1. KMK maksimal sebesar Rp. 10 Milyar
2. KI Non KUK sebesar Rp. 19 Milyar
3. KI Non KUK IDC sebesar Rp. 1 Milyar

Bahwa dengan persetujuan dari Pemimpin Wilayah BNI Makassar tersebut, Terdakwa memproses permohonan fasilitas kredit PT GMC yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan perjanjian kredit antara pemimpin sentra kredit kecil Parepare PT BNI (Persero) yaitu Terdakwa Drs Syahminal, MM dengan Aming Gosal selaku Direktur PT GMG, yaitu:

1. Perjanjian kredit no.2009.166 tanggal 30 desember 2009;
 - Jenis Fasilitas : Kredit (KI)
 - Kegunaan : Renovasi Mall of Makassar yang berlokasi di jalan Sungai Saddang Komplek Latanette Plaza Makassar;
 - Plafon : Rp 19.000.000.000,00 (Sembilan belas Milyar Rupiah);
 - Jangka Waktu : Masa Pinjaman 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 s.d 29 Desember 2019, termasuk grace period selama 6 bulan;
 - Tingkat Bunga : 14, 5% selama masa grace period.
2. Perjanjian kredit nomor 2009.167 tanggal 30 desember 2009.
 - Jenis Fasilitas : Kredit Investasi –Interest During

- Kegunaan : Construction (KI-IDC);
 - Kegunaan : Membayar bunga KI renovasi Mall Of Makassar yang berlokasi di Jalan Sungai Saddang Komplek Latanete Plaza Makassar;
 - Plafon : Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah);
 - Jangka waktu : Masa pinjaman 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember s/d 29 Desember 2019, termasuk grace period selama 6 bulan;
 - Tingkat Bunga : 14,5 % selama masa Grace Period.
3. Perjanjian kredit nomor 2009.168 tanggal 30 Desember 2009.
- Jenis Fasilitas : Kredit Modal Kerja (KMK);
 - Kegunaan : Membiayai tambahan modal kerja pengelolaan Mall of Makassar dan perdagangan pakaian jadi;
 - Plafon : Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Jangka waktu : Kredit diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 desember 2009 s/d 29 Desember 2010;
 - Tingkat bunga : 14,5% review setiap tahun.

Menimbang, bahwa jaminan atas Perjanjian Kredit adalah:

1. 1 (satu) unit T/B Mall 5 Lantai termasuk basement yang berlokasi di Jalan Sungai Saddang Kel. Pisang Selatan kec. Ujung Pandang Kota Makassar SHGB No. 235 tanggal 30 oktober 1991, GS No. 576/1991 Tgl 20 September 1991 an. PT. Kumala Putra Celebes dengan maa berlaku s/d tanggal 5 September 2011 SHBGB akan dibalik nama menjadi an. PT. Griya Maricaya Gemilang dan dilakukan perpanjangan hak Guna Bangunan.
2. Persediaan barang dagangan berupa aneka pakaian jadi akan ada di departemen storre yang berlokasi di Mall Of Makassar Jl. Sungai Saddang Komplekes Latanete Plaza Makassar akan diikat fidusia sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)

Menimbang, bahwa telah ternyata pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian kredit antara Terdakwa Drs. Syahminal, MM dengan Aming Gosal selaku Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang pada tanggal 30 Desember 2009 jaminan berupa asli Sertifikat HGB No 235 atas permohonan kredit PT. Griya Maricaya

Gemilang belum dilengkapi, tetapi masih dijadikan sebagai agunan atau jaminan di Bank Niaga ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta di atas khususnya terkait dengan agunan atau jaminan kredit yang diajukan oleh PT Griya Maricaya Gumilang, sudah tergambar dengan jelas bahwa sejak awal permohonan kredit tersebut, jaminan berupa Sertifikat HGU No. 235 tidak pernah ada aslinya diserahkan PT Griya Maricaya Gumilang kepada PT BNI (Persero) SKC Parepare serta sejak awal Terdakwa sudah mengetahui bahwa Sertifikat HGB No. 235 tersebut telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 5 September 2011 apalagi saat permohonan kredit diajukan, pemegang Hak guna Bangunan (HGB) No. 235 belum atas nama PT Griya Maricaya Gumilang serta pemegang HPL atas tanah tersebut bukanlah PT Griya Maricaya Gumilang melainkan Perusda Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa jaminan kredit atau agunan kredit adalah merupakan persyaratan yang sangat penting dalam setiap pemberian fasilitas kredit kepada nasabah guna menjamin pengembalian atau recoveri dari kredit yang sudah diterima oleh nasabah, manakala nasabah tidak mau atau tidak mampu mengembalikan kredit yang sudah diterimanya dari bank ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam masalah agunan atau jaminan kredit, prinsip kehati-hatian dari pihak perbankan mutlak adanya dalam arti pihak PT BNI (Persero) SKC Parepare wajib menempuh semua langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa agunan kredit tersebut dalam keadaan bersih atau tidak mengandung permasalahan apapun;

Menimbang, bahwa jika dicermati fakta di atas, dimana ketika permohonan kredit tersebut diproses oleh Analis/RO sampai kredit tersebut disetujui bahkan sampai tahap pencairan, telah ternyata asli dokumen jaminan berupa Hak Guna Bangunan (HGB) belum ada, dan hal itu sudah diketahui oleh Terdakwa, namun permohonan kredit dari PT Griya Maricaya Gemilang tersebut tetap diproses dengan alasan bahwa telah ada cover note dari Notaris/PPAT Hendrik Jaury, SH. Yang menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut sudah diproses. Bahwa adanya cover note dari Notari/PPAT tersebut, jug telah dijadikan alasan hukum Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk atau tidak tergolong dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan, melainkan hanya merupakan pelanggaran aturan perbankan sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa jika dicermati fakta di atas, dimana ketika permohonan kredit tersebut diproses oleh Analis/RO sampai kredit tersebut disetujui bahkan sampai tahap pencairan, telah ternyata asli dokumen jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 235 belum ada, dan hal itu sudah diketahui oleh Terdakwa sebagaimana

diterangkan saksi Asmiati Khumas dalam persidangan bahwa hasil call memo tanggal 31 Desember 2009 tentang fakta bahwa sertifikat nomor 235 masih terikat hak tanggungan di Bank CIMB Niaga. Sudah saksi sampaikan ke Penyelia dan Pemimpin SKC dan tidak ada pendapat baik dari penyelia dan terdakwa Syahminal selaku Pimpinan SKC, namun permohonan kredit dari PT Griya Maricaya Gumilang tersebut tetap diproses dengan alasan bahwa telah ada cover note dari Notaris/PPAT Hendrik Jaury, SH. Yang menjelaskan bahwa Sertifikat HGB No. 235 tersebut sudah diproses. Bahwa adanya cover note dari Notaris/PPAT tersebut, juga telah dijadikan alasan hukum Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk atau tidak tergolong dalam perbuatan penyalagunaan kewenangan, melainkan hanya merupakan pelanggaran aturan perbankan sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan persoalan tersebut terdapat dua hal yang perlu disorot, *pertama*, terkait dengan permasalahan waktu akan berakhirnya masa berlaku Sertifikat HGB No. 235 dan *kedua*, terkait dengan permasalahan tidak adanya dokumen asli dari Sertifikat HGB No. 235 yang akan dijadikan agunan atau jaminan kredit yang domohonkan oleh PT Griya Maricaya Gemilang ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan pertama, berdasarkan keterangan ahli HAMZAH, SH, MH. Bahwa sebelum permohonan kredit disetujui maka agunan berupa Sertifikat HGB No. 235 harus diperpanjang minimal 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya Sertifikat HGB No. 235 tersebut, kemudian baru dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan kredit. Dalam hal ini, Majelis amat sependapat dengan pendapat ahli tersebut, karena jaminan berupa Sertifikat HGB No. 235 yang paling bernilai selain nilai dari bendanya sendiri berupa bangunan, yang tidak kalah pentingnya adalah adalah masa berlakunya Sertifikat HGB No. 235 itu sendiri, karena jika masa berlakunya tinggal sedikit maka nilai agunannya juga menjadi kecil ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan kedua, karena merupakan persyaratan mutlak lengkapnya dokumen yang diperlukan sebelum permohonan kredit disetujui, maka manakala belum ada, maka tidak ada solusi lain lain selain menunda atau menolak pemberian fasilitas kredit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan di atas, dimana dua-duanya belum dipenuhi sebelum permohonan kredit disetujui, maka sudah nyata bahwa tindakan Terdakwa tersebut jelas merupakan suatu penyimpangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya cover note yang begitu dipercaya oleh Terdakwa, menurut hemat Majelis adalah sah-sah saja, namun Terdakwa yang sudah berkecimpung di bidang perbankan yang sudah kaya pengalaman dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, maka kepercayaan totalitas Terdakwa terhadap

covernote yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT menjadi patut dipertanyakan, karena sesungguhnya tetap harus bertanggung jawab manakala cover note yang dikeluarkan oleh Notars/PPAT itu tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, walaupun sudah barang tentu Notaris/PPAT itu harus pula dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena isi dari covernote yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Hendrik Jaury tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka Terdakwa secara hukum tetap harus bertanggungjawab, karena seharusnya Terdakwa tetap melakukan verifikasi faktual terhadap keberadaan SHGB tersebut. Terkait dengan pledoi Terdakwa bahwa yang harus bertanggung jawab sehubungan dengan data-data jaminan adalah Unit Appraisal, tentu Majelis sependapat dengan pledoi Terdakwa tersebut bahwa Unit Appraisal haruslah dimintai pertanggungjawabannya, namun tidaklah melepaskan tanggung jawab Terdakwa selaku analis/RO yang juga harus melakukan verifikasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah fakta dalam perkara ini bahwa setelah perjanjian kredit tersebut ditandatangani, maka selanjutnya PT GMG (Aming Gosal) mengajukan permohonan pencairan KI kepada PT. BNI SKC Parepare sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas milyar rupiah) dan oleh Drs. Syahminal, MM. Selaku pemimpin SKC BNI Parepare berdasarkan Memorandum yang dipersiapkan oleh Drs. Gusdi Hasanuddin dan Terdakwa Asmiati Khumas, telah menyetujui pencairan kredit Investasi tersebut dengan memindah bukukan dana rekening pinjaman KI nomor rekening 184642663 ke rekening giro PT Griya Maricaya Gemilang Nomor 184600814 sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas miliar rupiah) yang dicairkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	6 Januari 2010	Rp.7.331.340.000	Tahap I
2.	20 Januari 2010	Rp.5.126.305.000	Tahap II
3.	11 Maret 2010	Rp.6.543.660.000	Tahap III
	Jumlah	Rp.19.001.305.000	

Menimbang, bahwa terkait dengan pencairan kredit sebesar Rp. 19.000.000.000,- tersebut, telah ternyata pula terdapat penyimpangan, dimana seharusnya pencairan tersebut haruslah berdasarkan bobot atau progres pekerjaan, namun kenyataannya kredit tersebut dicairkan tidak berdasarkan bobot pekerjaan sebagaimana diterangkan Terdakwa dan saksi Giri Bayu Khusumah, S.E. (Direktur Utama PT Bina Mitra Consulindotama) bahkan telah diakui sendiri oleh Terdakwa Asmiati Khumas dan saksi Gusdi Hasanuddin yang menerangkan bahwa mereka telah mengeluarkan memo terkait dengan pencairan yang belum sesuai dengan bobot pekerjaan, tetapi tetap dicairkan atas petunjuk Drs. Syahminal, M.M. selaku SKC BNI Parepare;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dana yang sudah dicairkan PT Griya Maricaya Gemilang kemudian Aming Gosal selaku Direktur PT Griya Maricaya Gemilang telah mempergunakan sebagian dana itu untuk menebus Sertifikat HGB No. 235 di PT Bank Niaga Tbk, dimana terhadap penggunaan dana kredit yang tidak sesuai peruntukannya tersebut, meskipun Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui kalau dana tersebut ternyata telah digunakan PT Griya Maricaya Gemilang untuk menebus Sertifikat HGB No. 235 di PT Bank Niaga Tbk, namun ketidaktahuan Terdakwa tersebut patut diragukan karena telah ada laporan dari PT. Bina Mitra Consulindotama Perwakilan Makassar yang saat itu dipimpin oleh Supriyono mengenai bobot atau progres pekerjaan, sedangkan kredit yang sudah dicairkan jumlahnya sudah melebihi bobot pekerjaan, sehingga Terdakwa patut mempertanyakannya bahkan seharusnya Terdakwa tetap mengawasi penggunaan dana tersebut dikarenakan jika tidak digunakan sesuai peruntukannya, maka dapat berakibat tidak selesainya kegiatan renovasi gedung Mall of Makassar yang dibiayai dengan kredit tersebut sehingga tujuan pemberian kredit menjadi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa untuk Kredit Modal Kerja, Aming Gosal selaku Direktur PT Griya Maricaya Gemilang pada tanggal 6 April 2010 mengajukan permohonan pencairan KMK sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada pemimpin PT BNI SKC Parepare melalui surat No.067/GMG/IV/2010 dan atas surat permohonan tersebut pemimpin PT BNI SKC Parepare menyetujui dilakukan disposisi KMK maksimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui over booking ke rekening giro PT Griya Maricaya Gemilang nomor 184600814 dan uang kredit KMK tersebut sudah ditransfer ke rekening PT Griya Maricaya Gemilang, padahal terdakwa mengetahui bahwa renovasi Mall of Makassar belum selesai dan belum ada kepastian kapan waktu mulai beroperasi serta debitur belum menyerahkan *Letter of Commitment* dari calon tenant yang akan menyewa area Mall of Makassar sebagai syarat pencairan dana KMK.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku analis/RO berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit kepada PT Griya Maricaya Gemilang sebagaimana telah diuraikan penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutanannya, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan kepadanya karena telah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut dengan benar sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Kebijaksanaan, organisasi dan prosedur sentra kredit kecil, indeks No. B01-09 BAB VI halaman 1 dan 2 Instruksi nomor IN/064/REN tanggal 4 agustus 2009, Pedoman kebijaksanaan dan prosedur kredit segmen kecil-buku I bab Persetujuan Kredit bab

tanggung jawab dan wewenang sub sub bab pemimpin cabang indeks CO2-02 BAB II sub Bab I sub sub bab 07, halaman 1 Instruksi: IN/0076/PMR tanggal 26 juni 200', Pedoman Kebijakan dan prosedur kredit retail market- Buku I Bab Analisa kredit sub sub tanggung jawab, wewenang sub sub pemimpin cabang Bab II sub Bab H sub sub Bab 08 Indeks ; IN/0123/PMR tanggal 1 juni 2003 halaman 1, Pedoman Kebijaksanaan Organisasi dan prosedur buku pedoman uraian jabatan kantor besar sentra kecil indeks: B01-09 Bab VI Halaman 1 Instruksi ; IN/064/REN tanggal 4 Agustus 2009 dan Pedoman Kebijakan dan prosedur kredit segmen kecil Buku I bab Analisa kredit sub bag struktu fasilitas kredit sub sub bab Pengikatan Jaminan Indeks CO2-02 bab I sub bab G sub sub bab 4 halaman 1 Instruksi : IN/0316/PMR tanggal 11 Desember 2000 angka 4 huruf c pada pokoknya dijelaskan jangka waktu masing-masing hak atas tanah (khusus untuk HGB, HGU dan HP) tidak lebih pendek dari jangka waktu kreditnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan memo yang dikeluarkan Terdakwa, menurut hemat Majelis bahwa memo yang dikeluarkan tersebut adalah belum cukup untuk menghilangkan tanggung jawab Terdakwa selaku Analis/RO, karena seharusnya Terdakwa langsung menolak permohonan kredit tersebut apapun risikonya apabila belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, apalagi kedudukan Terdakwa selaku Analis/RO adalah bersifat mandiri atau Independen yang tentu menempatkan Terdakwa dalam posisi menentukan layak tidaknya permohonan itu untuk diproses sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang selaku Analis/RO. Oleh karena itu, argumentasi penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa bukanlah penentu dan pemutus dalam pemberian dan pencairan kredit di BNI (Persero), tidak sepenuhnya benar karena dengan posisi yang independen yang dimiliki Analis/RO, Penyelia, Pemimpin SKC maupun Pemimpin Wilayah dan seterusnya, tentu memiliki kewenangan masing-masing untuk menerima atau menolak layak tidaknya permohonan kredit itu diproses dan disetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas terkait dengan unsur ini, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi *unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*.

Ad. 2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur kedua menandakan bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu unsur apakah menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataukah suatu korporasi terpenuhi maka terpenuhilah unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa kata “tujuan” dalam unsur ini dapat dimaknai sebagai maksud atau sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dari aspek segmentasi kredit yang berlaku di PT BNI (Persero) maka seharusnya kredit yang dimohonkan PT Griya Maricaya Gemilang seharusnya melalui di PT BNI (Persero) SKM Makassar bahkan menjadi kewenangan PT BNI (Persero) kantor pusat untuk memutuskannya, namun terdakwa tetap memproses permohonan tersebut ketika diajukan melalui PT BNI (Persero) SKC Parepare;

Menimbang, bahwa di atas juga sudah dipertimbangan bahwa ketika permohonan kredit tersebut diproses oleh Terdakwa selaku Analis/RO sampai kredit tersebut disetujui bahkan sampai tahap pencairan, telah ternyata ada transfer sli dokumen jaminan berupa Sertifikat HGB No. 235 belum ada, dan hal itu sudah diketahui oleh Terdakwa, namun permohonan kredit dari PT Griya Maricaya Gemilang tersebut tetap diproses dengan alasan bahwa telah ada cover note dari Notaris/PPAT Hendrik Jaury, SH. yang menjelaskan bahwa Sertifikat HGB No. 235 tersebut sudah diproses. Demikian pula berdasarkan keterangan ahli bahwa sebelum permohonan kredit disetujui maka harus agunan berupa Sertifikat HGB No. 235 harus diperpanjang minimal 2 tahun sebelum berakhirnya Sertifikat HGB No. 235 tersebut kemudian baru dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan kredit;

Menimbang, bahwa adalah pula fakta dalam perkara ini bahwa terkait dengan pencairan kredit sebesar Rp. 19.000.000.000,- tersebut, dimana seharusnya pencairan tersebut haruslah berdasarkan bobot atau progres pekerjaan, namun kenyataannya kredit tersebut tetap dicairkan walaupun tidak berdasarkan bobot pekerjaan. Demikian pula telah ternyata setelah dana yang sudah dicairkan PT Griya Maricaya Gemilang tersebut sebahagian telah dipergunakan oleh Aming Gosal untuk menebus Sertifikat HGB No. 235 di PT Bank Niaga Tbk, yang seharusnya digunakan seluruhnya renovasi gedung Mall of Makassar sehingga tujuan pemberian kredit menjadi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa untuk Kredit Modal Kerja, Aming Gosal selaku Direktur PT Griya Maricaya Gemilang pada tanggal 6 April 2010 mengajukan permohonan pencairan KMK sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) kepada Terdakwa selaku pemimpin PT BNI SKC Parepare melalui surat No.067/GMG/IV/2010 dan atas surat permohonan tersebut Terdakwa menyetujui dilakukan disposisi KMK maksimal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui overbooking ke rekening giro PT Griya Maricaya Gemilang nomor 184600814 dan uang kredit KMK tersebut sudah di transfer ke rekening PT Griya Maricaya Gemilang, padahal Terdakwa mngentahui bahwa renovasi Mall of Makassar belum selesai dan belum ada

kepastian kapan waktu mulai beroperasi serta debitur belum menyerahkan *Letter of Commitment* dari calon tenant yang akan menyewa area Mall of Makassar sebagai syarat pencairan dana KMK;

Menimbang, bahwa mulusnya pemberian kredit kepada PT Griya Maricaya Gemilang meskipun terdapat point-point penyimpangan dalam proses pemberian dan penggunaan kredit tersebut sebagaimana diuraikan di atas, menjadi bukti adanya kesengajaan Terdakwa untuk memaknai kata dengan maksud menguntungkan dalam unsur ini untuk menguntungkan orang lain yaitu PT Griya Maricaya Gemilang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa yang sudah berpengalaman di bidang perbankan, tentu sudah memikirkan kemungkinan terburuk yang dapat terjadi manakala terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pemberian kredit tersebut, namun Terdakwa tetap memprosesnya, sehingga pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan tidak ada *mens rea* dalam perbuatan Terdakwa, menjadi tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Majelis berkesimpulan bahwa unsur *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena::

- a. Berada dalam penguasaan atau pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan atau pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara dan atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa dengan mengutip penjelasan Pasal 3 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa delik korupsi yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut merupakan delik formil, yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan kata lain unsur dapat merugikan keuangan negara dianggap sudah terbukti manakala perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan keuangan negara tanpa mensyaratkan kerugian negara secara nyata terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan atas bahwa dana yang telah dicairkan PT Griya Maricaya Gemilang kemudian

digunakan dalam kegiatan renovasi gedung Mall of Makassar adalah bersumber dari BNI dan sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hal dari kewajiban yang timbul diantaranya karena berada dalam, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara, maka sudah jelas bahwa dana yang digunakan untuk membayar kelima warga tersebut adalah masuk dalam pengertian keuangan negara;

Menimbang, bahwa pengeluaran dan pemanfaatan keuangan negara tentu harus melalui prosedur menurut hukum, efisien dan tepat sasaran sebagaimana telah digariskan dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara. Manakala terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sudah jelas bertentangan dengan norma yang diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis bahwa dengan terbuktinya unsur menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangan di atas, maka dengan sendirinya unsur dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi pula, karena dengan adanya perbuatan terdakwa yang menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yang berasal dari keuangan negara yang diperoleh karena adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa selaku Analis/RO PT BNI (Persero) SKC Parepare, maka keuangan negara menjadi dirugikan yang menurut Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diperkuat dengan pendapat/keterangan ahli Imam Surono, Ak.Cfe sebesar Rp. 34.690.655.139,- (Tiga puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka unsur *Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berikut ini dan dalam konteks dakwaan maupun tuntutan penuntut umum, maka penyertaan (*deelneming*) dalam perkara Terdakwa hanyalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti orang yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*daden*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doenplegen*),

mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (*uitlokking*). Dalam perkara ini akan dipertimbangkan apakah tindak pidana itu dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama baik sebagai pelaku, menyuruh melakukan, turut serta atau menganjurkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam perkara ini bahwa Terdakwa selaku Analis/RO bersama-sama dengan Penyelia Gusdi Hasanuddin dan Drs. Syahminal Yonnidarma, MM. Selaku pemimpin PT BNI (Persero) SKC Parepare telah memproses permohonan kredit yang diajukan oleh PT Griya Maricaya Gemilang dan setelah dianggap telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka permohonan tersebut diteruskan ke BNI Wilayah Sulselbar untuk dimintakan persetujuan. Bahwa setelah ditujui oleh Pemimpin Wilayah dalam hal ini Drs. Sukarno, MBA, maka selanjutnya Terdakwa bersama RO dan Penyelia membuat surat keputusan kredit yang dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian kredit sampai akhirnya dicairkan oleh PT Griya Maricaya Gemilang sebesar 30 milyar rupiah;

Menimbang, bahwa adalah pula fakta dalam perkara ini bahwa yang menjadi jaminan dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT Griya Maricaya Gemilang adalah Sertifikat HGB No. 235 tanggal 30 Oktober 1991, GS No. 576/1991 Tgl 20 September 1991 an. PT. Kumala Putra Celebes dengan masa berlaku s/d tanggal 5 September 2011, Sertifikat hak Guna bangunan yang kemudian dibalik nama menjadi an. PT. Griya Maricaya Gemilang;

Menimbang, bahwa pada saat proses permohonan kredit tersebut dilakukan sampai tahap persetujuan dan proses pencairan kredit, telah ternyata agunan atau jaminan kredit berupa asli Sertifikat HGB No. 235 tanggal 30 Oktober 1991, GS No. 576/1991 Tgl 20 September 1991 tidak pernah diserahkan kepada PT BNI (Persero) SKC Parepare, tetapi masih menjadi jaminan di Bank Niaga, demikian pula dengan proses pencairan kredit tersebut ternyata tidak berdasarkan bobot pekerjaan, sehingga sudah nyata adanya penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit tersebut kepada PT Griya Maricaya Gemilang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta di atas telah tergambar dengan jelas bahwa terwujudnya perbuatan penyimpangan dalam pemberian kredit tersebut atau terwujudnya delik tersebut karena adanya kerjasama tidak hanya antara Drs. Syahminal yonnidarma, MM. Selaku pemimpin SKC, Terdakwa selaku Analis/RO dan Penyelia, Supatmo selaku Unit Apraisal, Hendrik Jaury, SH yang telah mengeluarkan cover note yang isinya tidak benar dengan Aming Gosal selaku direktur PT Griya Maricaya Gemilang, tetapi juga terdapat peran menentukan dari Drs. Sukarno, MBA selaku pemimpin wilayah yang berwenang memutuskan kredit yang diajukan oleh PT Griya Maricaya Gemilang, dimana pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian kredit tersebut tentu berangkat dari niat yang sama yakni terwujudnya pemberian kredit kepada

PT Griya Maricaya Gemilang walaupun mereka sudah tahu dan menyadari bahwa terdapat hal-hal yang seharusnya dipenuhi sebelum pecairan kredit tersebut dilakukan sebagaimana telah diuraikan di atas, karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dakwaan, maka jelas bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak semata-mata mengandung unsur keperdataan, tetapi sekaligus memenuhi rumusan delik korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena itu terhadap pembelaan Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa terkait dengan persoalan tersebut maupun pembelaan yang secara spesifik dipertimbangkan, haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, dimana semua unsur dakwaan subsidair terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut sehingga sudah selayaknya Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan karena tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai penggantian kerugian negara, kendatipun Terdakwa mempunyai andil dalam terjadinya kerugian negara namun tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan apalagi menikmatinya, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa adalah tidak adil apabila terdakwa dibebani untuk mengganti kerugian negara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sesuai tuntutan penuntut umum bahwa barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara lain, maka adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang layak bagi Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan, yaitu :

Hal-Hal yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terus terang menerangkan perbuatan yang dilakukannya dan berlaku sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa masih berusia relatif muda;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang nomor 48 Tahun 2010 tentang Pengadilan Tipikor dan peraturan lain yang terkait.

2. Analisis Penulis

Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah dipaparkan di atas, maka yang dapat penulis pahami adalah bahwa pertimbangan hakim dimulai dari pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan yang dimulai dari dakwaan primair kemudian pada dakwaan subsidair. Dari proses persidangan yang dilakukan maka hakim menemukan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan subsidair yaitu terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dalam mewujudkan kredit yang memiliki banyak penyimpangan dengan tujuan menguntungkan orang lain yaitu Aming Gosal selaku pemohon yang berakibat merugikan keuangan negara. Karena seluruh unsur dakwaan telah terbukti, maka jelas bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak semata-mata mengandung unsur keperdataan, tetapi sekaligus memenuhi rumusan delik korupsi.

Kemudian pertimbangan hakim mengenai konteks penyertaan (*deelnemning*) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu perbuatan terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti orang yang turut serta melakukan perbuatan itu. Dimana pihak-pihak yang terlibat dalam terwujudnya pemberian kredit karena adanya peranan masing-masing dan kerjasama yang mereka lakukan. Karena mereka sudah tahu dan menyadari bahwa terdapat hal-hal yang seharusnya dipenuhi sebelum pecairan kredit.

Hakim juga mempertimbangkan mengenai penggantian kerugian negara, kendatipun terdakwa mempunyai andil dalam terjadinya kerugian negara namun tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan apalagi menikmatinya, maka hakim berpendapat bahwa adalah tidak adil apabila terdakwa dibebani untuk mengganti kerugian negara tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu hakim yang memutus perkara ini yaitu Dr. Abdul Razak, SH, MH. mengungkapkan bahwa Majelis Hakim memiliki pendapat yang sama dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa, juga sebelum menentukan suatu putusan ada berbagai hal yang menjadi pertimbangan Hakim. Berdasarkan pasal 183 KUHP, hakim dalam penjatuhan pidana harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah kemudian dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.

Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan pembedaan dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek sosiologis. Hakim dalam memutus perkara pada putusan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti, tuntutan jaksa penuntut umum dan peraturan perundang-undangan. Selain pertimbangan yuridis, Hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis, yaitu dari aspek non hukum yakni sebelum menjatuhkan hukuman yang layak bagi terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan.

Karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan karena tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka majelis hakim berhak untuk menjatuhkan hukuman. Maka pada akhirnya, Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp..50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Maka menurut penulis, proses pengambilan keputusan dalam Putusan Nomor 41/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Mks yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks adalah Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan pasal tersebut telah sesuai karena unsur-unsur tindak pidana dalam pasal terbukti telah terpenuhi. Begitupula Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tepat diterapkan pada perkara ini karena terwujudnya delik sebab adanya kerjasama antar Terdakwa, rekannya dan pemohon kredit. Sedangkan pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi karena terdakwa tidak terbukti memperoleh bagian dari hasil perbuatan korupsi.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa selaku karyawan badan usaha milik negara dalam putusan nomor

41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks telah sesuai karena dalam pertimbangan hukum oleh hakim, perbuatan terdakwa adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan orang lain yang berakibat merugikan keuangan negara dan tidak terdapat alasan pembenar, Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggungjawab, dan melakukan perbuatan dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Maka hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Sehingga dengan demikian putusan majelis hakim yang berisikan pemidanaan sudah tepat.

B. Saran

1. Para aparat penegak hukum baik itu jaksa, pengacara dan hakim haruslah menguasai pengetahuan ilmu hukum yang baik dan mumpuni khususnya tentang hukum pidana korupsi, karena diharapkan pada saat menangani suatu perkara dapat menerapkan ketentuan hukum pidana yang sesuai, sehingga para pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dengan didasari penerapan hukum pidana yang tepat dari para penegak hukum, maka rasa keadilan dapat dirasakan bagi semua kalangan.

2. Bagi kalangan BUMN agar tak terjerat kerugian keuangan negara karena perbuatan korupsi, maka dalam menjalankan kegiatan usaha BUMN harus selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Internal Perusahaan. BUMN juga harus senantiasa transparan, akuntabel, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dan menghindari konflik kepentingan dalam mengambil keputusan dan melakukan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing: Malang
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Mahakarya Rangkang Offset: Yogyakarta
- Amiruddin. 2010. *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Genta Publishing. Yogyakarta
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. PT. Rineka Cipta: Jakarta
- Andi Hamzah. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Chaerudin DKK. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. PT Refika Aditama: Bandung
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama: Bandung
- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)* Sinar Grafika: Jakarta
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*. Sinar Grafika: Jakarta
- Gatot Supramono. 1997. *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*. PT. Alumni. Bandung
- Guse Prayudi. 2010. *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*. Pustaka Pena: Yogyakarta
- I. S. Susanto. 1995. *Kejahatan Korporasi*. BP Universitas Diponegoro UNDIP: Semarang
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2009. *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*. KPK: Jakarta
- Lilik Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik, dan Masalahnya*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-I. PT. Alumni: Bandung

P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung

Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. CV. Mandar Maju: Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Internet

<http://www.antikorupsi.org/id/content/reinterpretasi-unsur-melawan-hukum> diakses pada 18 Oktober 2016, pukul 22:08 WITA

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV> diakses pada 6 Nopember 2016, pukul 12:33 WITA

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50913e5b4d3a1/kekayaan-> diakses pada 18 Oktober 2016, pukul 21:41 WITA

<https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> diakses pada 21 Oktober 2016 Pukul 21:30 WITA

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 – 3634667

WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

Makassar, 10 Januari 2017

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ *12* /HKM/I/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

BASO RASYID, SH.,MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : AZHARUL NUGRAHA PUTRA PATURUSI
No.Pokok : B11113069
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Bontoloe Blok A No. 7 Daya Makassar
Judul Skripsi : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN BADAN
USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 41.
PID.SUS.TPK/2015/PN.MKS0".

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017, dan telah dibimbing oleh :

1. DR. ABDUL RAZAK, SH.,MH..

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tanggal 16 Desember 2016 Nomor : 17183/UN4.5.3/ PL.02/2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA


BASO RASYID, SH.MH
NIP.196112101982031007